

# APPENDICES



Warnick and Inch's Classification of Fallacies

Table 3.2 Identification of Logical Fallacies

Fallacies	Faulty Reasoning				Grounding			Misdirection			Language Use		
	False Analogy	Hasty Generalization	False Cause	Slippery Slope	Begging the Question	Non Sequitur	Ad Hominem	Ad Populum	Appeal to Tradition	Straw Argument	Equivocation	Amphiboly	Emotive Language
Article													
26. 07/01													
27. 08/01													
28. 09/01				1									1
29. 12/01													
30. 13/01													
31. 14/01													
32. 15/01													
33. 16/01				1		1				1			2
34. 19/01						1							2
35. 20/01				1									2
36. 21/01													1
37. 23/01						1							
38. 26/01													
39. 27/01	1												1
40. 28/01			1										
41. 29/01		1		2									2
42. 30/01				1									1
Total	1	5	6	11		10				1			29

Date: 1 December 2003

“Urbanisasi Pasca-Lebaran”

*Tiap tahun, se usai Lebaran, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya jumlah penduduknya selalu bertambah. Pertambahan ini akibat para pemudik membawa sanak saudaranya yang 'berhasil' merantau ke kota-kota besar.*

Single Cause

Padahal merantau di kota besar sebenarnya bukan hal yang mudah. Tanpa tempat tinggal, pekerjaan dan ketrampilan yang memadai, kaum perantau ini akan terlunta. Keberadaan mereka ini jelas akan menambah runyam masalah di kota-kota besar yang selama ini sudah sedemikian dipusingkan dengan berbagai soal.

Namun kedatangan mereka ini bukan tanpa sebab. Kebanyakan mereka datang karena tekanan ekonomi dan ketiadaan lapangan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, merantau menjadi salah satu pilihan di samping menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Penyebab urbanisasi itu ada di hulu, ada di pedesaan, di provinsi tetangga kota-kota besar seperti Banten, Lampung, Jabar, Jateng, DI Jogjakarta dan Jatim. Penyebab kemiskinan pun sudah sejak dahulu juga sudah diketahui, yaitu karena faktor pendidikan, tidak meratanya kesempatan berekonomi, kebijakan sepihak dan ketidakadilan lainnya.

Karena itu sebenarnya tiap daerah perlu menekankan pentingnya memberdayakan warga penduduknya, sesuai dengan asas otonomi daerah. Pemberdayaan itu bukan hanya demi memenuhi harkat otonomi yang mengutamakan mengurus daerah sendiri, namun lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif solusinya.

Inti berotonomi adalah memenuhi harkat kemanusiaan rakyat daerah sendiri dengan memberdayakan rakyat daerah, sehingga tidak membiarkan mereka tetap bergelut dengan kemanusiaan.

Dengan demikian, mereka bisa tetap bertahan di kampung halamannya, menjadi benteng ekonomi pedesaan, menjadi penyangga pembangunan di wilayahnya. Mereka juga akan lebih setara dengan warga dan rakyat daerah tetangga, bahkan setara tingkat ekonominya dengan rakyat level perkotaan, yang selama ini menjadi semacam iming-iming bagi mereka.

Yang juga perlu kita pikirkan juga adalah adanya lembaga lintas daerah dan provinsi. Di sini Pemkot Surabaya, misalnya, harus bekerja sama dengan daerah-daerah atau kabupaten tetangga, dalam menangani kemiskinan dan ketidakberdayaan di daerah-daerah.

Penanganan itu bertujuan agar setelah berdaya dan mampu ekonominya, rakyat tidak lagi tergiur untuk melanglang buana dan bertualang di kota-kota besar.

Lembaga lintas daerah ini meski nampak terlalu ideal, tapi harus dimulai karena merupakan solusi penyelesaian mendasar urbanisasi.

Date: 2 December 2003

"Gejolak di Papua"

Papua bergejolak kembali menjelang apa yang dinamakan HUT mereka. Memang separatisme masih merupakan salah satu masalah besar yang terus dihadapi Republik ini. Dapat dikatakan bahwa separatisme semacam gerakan yang tiada kunjung padam masa ke masa, selalu saja ada yang berkeinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alasannya yang sebenarnya bermacam-macam. Tetapi yang paling banyak karena kecewa terhadap pemerintah pusat. Kecewa sebab pusat dinilai telah memperlakukan mereka secara tidak adil.

*Contohnya daerah yang kaya sumber alam. Kekayaan mereka dikuras, disedot hanya sedikit yang menetes kembali ke daerah asal.* Maka, muncullah pemberontakan, keinginan untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI.

Gerakan separatisme juga masih bercokol di Papua. Sekalipun tidak sehebat yang terjadi di Aceh, gerakan separatisme di Papua masih seperti dalam sekam yang siap berkobar setiap saat.

Tanggal 1 Desember, semua persoalan yang melilit Papua itu menjadi hangat kembali. Sebab, 1 Desember dianggap sebagai hari ulang tahun Papua. Tiap 1 Desember tiba, tiap kali pula sejumlah orang mengibarkan bendera Melanesia. Pengibaran bendera itu secara politis, adalah bukti masih bercokolnya keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Papua jelas masih terus menyimpan gejolak untuk merdeka. *Keadaan ini sebenarnya karena lembeknya sikap pemerintah pusat.* Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, contohnya, menganggap Bintang Kejora sebagai bendera kultural. Bahkan, Mendagri Hari

Emotive language

False cause

Sabarno menyatakan perayaan HUT Papua dapat dilakukan di rumah masing-masing asal secara tidak spektakuler.

Separatisme jelas tidak dapat diatasi dengan sikap setengah-setengah seperti itu. Tapi tidak juga diatasi dengan sikap arogan pemerintah pusat, yang menganggap paling benar. Dengan menyadari dua perkara ini, gejala di Papua mestinya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih bijak.

Tetapi yang juga harus diakui pemerintah akhir-akhir ini juga punya andil besar mendorong terjadinya potensi disintegrasi.

Pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang mendapat perlawanan di daerah, terus dilanjutkan. Kemudian yang juga menimbulkan perlawanan adalah dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Irian Jaya Barat.

Ini sebenarnya tak perlu karena sebelumnya, sudah ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang meliputi semua wilayah Papua sebagai satu provinsi. Termasuk wilayah Papua yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Irian Jaya Barat. Maka, terjadilah semacam dualisme di tubuh KPU daerah di Papua. Kalau pemerintah tetap saja berbuat seperti itu dan memaksakan kehendak sulit kiranya mengambil hati warga Papua untuk melupakan cita-cita memisahkan diri.

Date: 3 December 2003

“Penegakan Disiplin Harus Konsisten”

Libur Nasional selalu saja menjadi perkara. Perkara klasik yang muncul adalah kebiasaan bolos kerja para pegawai negeri sipil (PNS), cenderung molor atau *mencuri* sehari sebelum libur dan sehari sesudah libur dengan berbagai alasan untuk tidak masuk kantor.

Salah satu alasan yang seolah-olah memperoleh pembenaran bolos adalah libur yang jatuh pada hari ‘kejepit’.

Untuk melawan kebiasaan ‘hari kejepit’ itu pemerintah memberi tambahan libur tiga hari kepada PNS berkenaan dengan Idul Fitri yang jatuh pada Selasa dan Rabu. Maka, jika ditambah libur Sabtu dan Minggu, total libur Idul Fitri menjadi sembilan hari.

Pemerintah kemudian *menggertak* akan menindak tegas pegawai negeri yang tidak masuk kantor pada Senin, 1 Desember lalu. Edaran berisi gertakan itu disampaikan jauh sebelum Idul Fitri.

Emotive language

Hasilnya, kebiasaan membolos masih saja terjadi. Libur panjang yang dinikmati selama sembilan hari belum cukup bagi sebagian PNS. Mereka terus saja memperpanjang liburan.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin, meninjau sejumlah kantor pemerintahan kemarin pagi. Yang dijumpai adalah masih ada saja pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas.

*Hari pertama kerja setelah libur panjang membuktikan bahwa disiplin kerja pegawai negeri sipil kita masih jelek. Disiplin yang longgar ini dipermudah oleh disiplin yang lembek dari atasan.*

Non-sequitur

Meski Menteri PAN Feisal Tamin menyodorkan angka-angka statistik bahwa jumlah pegawai negeri yang bolos setiap usai libur Idul Fitri menurun dari tahun ke tahun, tapi tak dapat dipungkiri disiplin PNS rendah.

Kita sebenarnya layak bergembira karena jumlah PNS yang mangkir setiap usai libur Idul Fitri menurun drastis dari tahun ke tahun. Akan tetapi, itu belum memberikan gambaran apa-apa tentang produktivitas, loyalitas, dan dedikasi terhadap pelayanan publik.

Karena itu sanksi tegas harus diberlakukan. Kampanye tentang disiplin harus semakin hari semakin digalakkan. Para pejabat tinggi harus menjadi pelopor –pelopor disiplin. Tanpa itu, disiplin tidak lebih dari retorika.

Dan bukan hanya soal libur nasional itu saja yang sebenarnya harus dibenahi. Disiplin tiap harilah yang sebenarnya terus harus dipelihara, karena melalui disiplin yang terus-menerus itulah akan membentuk perilaku yang otomatis dari para pelakunya.

Ketika negara masih menjadi sumber dinamika ekonomi seperti Indonesia, kedisiplinan PNS sangat menentukan kemajuan bangsa ini. PNS yang korup dan malas akan menularkan korupsi dan kemalasan.

Kecenderungan meningkatnya disiplin saat libur nasional ini harus terus dipupuk. Tetapi sekali lagi yang tak kalah pentingnya adalah konsistensi dan keberanian untuk terus-menerus memperbaiki yang salah. Disiplin yang lembek tidak boleh dipelihara.

Date: 5 December 2003

“Benang Kusut Pembunuhan KH Asmuni”

Kasus pembunuhan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatiroto KH Asmuni Ishak menjadi benang kusut. Ruwet.

Hal ini terjadi karena terlanjur masuk ke ranah politik. Sehingga penanganan secara kriminal murni menjadi lebih sulit karena hipotesis-hipotesis yang dikembangkan polisi akan berbenturan dengan asumsi-asumsi politis di masyarakat.

Di samping itu, hasilnya belum tentu mendapat legitimasi masyarakat. Karena masyarakat terlanjur memiliki kerangka bahwa pembunuhan ini berlatar belakang politik. Ditambah ada kecurigaan keterlibatan state (negara). Padahal polisi merupakan institusi state.

Pengakuan Ketua DPC PKB Jatiroto Husein Cholil bahwa dirinya diintimidasi dan dipaksa mengakui sebagai pelaku pembunuhan KH Asmuni oleh aparat penyidik, jelas memperuwet persoalan. Mau tidak mau dapat memperbesar kecurigaan masyarakat bahwa state terlibat.

Kecurigaan masyarakat itu juga dilatarbelakangi kasus Teror Ninja I tahun 1999 di mana ada kecurigaan ke state. Sampai-sampai Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik harus istirahat di tengah jalan karena dicurigai sebagai aparat state yang terlibat.

Menjadi lebih ruwet lagi karena terjadi perbedaan persepsi di masyarakat. Misalnya antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nahdlatul Ulama (NU), dua institusi yang sama-sama mempunyai KH Asmuni Ishak. Di samping pengurus PKB, KH Asmuni adalah tokoh NU. Ia pernah menjabat sebagai Ketua NU Jatiroto.

PKB melalui Gus Dur terus terang tidak percaya terhadap penyidikan yang dilakukan polisi. Sementara Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi meminta masyarakat mempercayai polisi.

Mencuatnya polemik Gus Dur-Hasyim Muzadi ini memunculkan persoalan baru yang ruwet pula. Masalah pembunuhan KH Asmuni bahkan tergeser oleh isu perpecahan Gus Dur-Hasyim. Perbedaan keduanya dianggap dalam konteks rivalitas menuju kursi kepresidenan kedua tokoh tersebut.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana persoalan pembunuhan itu segera dapat dibuka secara gamblang. Apakah ada unsur politis atau semata-mata kriminal murni.

Untuk itulah kita mengharapkan polisi melakukan pengusutan secara transparan. Tidak salah pula kalau polisi melibatkan masyarakat.

Misalnya, menyertakan wakil NU dan PKB. *Hal demikian bukan berarti membiarkan institusi polisi diinjak-injak, melainkan untuk mengefektifkan penyelidikan dalam arti agar mendapat legitimasi masyarakat.*

Emotive language

Penyertaan masyarakat itu sebenarnya juga bernilai pengawasan terhadap lembaga kepolisian. Kita melihat, pengawasan ke lembaga kepolisian sangat lemah sejak polisi terpisah dari militer.

Kalangan politisi agar mengurangi intervensinya ke lembaga kepolisian. Pernyataan-pernyataan politik yang sebenarnya bernuansa menunggangi kasus pembunuhan itu untuk kepentingan 'kampanye', haruslah dibentakan. Sebab, hanya mempersulit penyelidikan secara tuntas.

Date: 8 December 2003

"Tindak Tegas Pembobol Bank"

*Setelah terjadinya pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun kini giliran BRI bobol sebesar Rp 294 miliar. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap bank-bank sangat lemah.*

Hasty generalization

Kini kejaksaan terus menyidik kasus bobolnya BRI (Bank Rakyat Indonesia) senilai Rp 294 miliar. Tiga tersangka kini ditahan.

Ketiga tersangka yang ditahan adalah Kepala Cabang BRI Senen Ir Deden Gumilar yang ditahan sejak 3 November 2003 lalu, Kepala Cabang Pembantu BRI Tanah Abang Agus Riyanto yang ditahan sejak 20 November 2003, dan Kepala Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor yang ditahan sejak 13 November. Ketiganya kini ditahan di Rutan Salemba.

Dari keterangan Humas Kejaksaan Agung terungkap bahwa mereka menyidik kasus dugaan korupsi ini bukan atas laporan dari direksi BRI. Kasus tersebut adalah murni temuan masyarakat.

Bahkan, menurut Humas Kejaksaan Kakanwil BRI DKI Jakarta terkesan menutup-nutupi kasus ini saat dilakukan penyidikan.

Kasus ini bermula ketika terjadi transaksi deposito on call dari BPD Kaltim ke BRI Senen senilai Rp 100 miliar lebih. Namun, pada hari yang sama, ada faksimili dari BPD Kaltim kepada BRI Cabang Senen agar memindahkan deposito tersebut ke rekening PT

Delta Makmur Eksperindo (DME). PT DME ini dipimpin oleh Direktur Utama Hartono dan komisarisnya Yudi Kartolo.

Lalu kemudian, BRI Cabang Senen mentransfer rekening tersebut hanya berdasarkan faksimili dari BPD Kaltim.

Sekali lagi ini membuktikan lemahnya manajemen perbankan di Indonesia, tanpa cek dan ricek serta tanpa verifikasi, uang langsung ditransfer ke PT DME.

Begitu juga dengan adanya penjaminan deposito terhadap BRI Cabang Pembantu Tanah Abang, di mana uang juga ditransfer tanpa verifikasi. Padahal, permintaan pemindahan itu adalah fiktif alias palsu.

*Berulangnya kasus pembobolan bank-bank pelat merah semakin jelas disebabkan lemahnya sikap pimpinan dan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah dan pimpinan bank harus bersikap keras terhadap para penjahat perbankan.*

*Membbaiknya situasi ekonomi nasional yang tercermin dari stabilitas finansial ternyata masih sangat rapuh karena tidak diimbangi dengan perubahan budaya dan perilaku, terutama dari sistem perbankan nasional.*

Sebenarnya system operating procedure yang dibuat kalangan perbankan sudah sangat bagus dan disusun dengan biaya mahal tidak akan ada artinya kalau sikap pimpinan lembek terhadap diri sendiri atau lingkungannya lemah.

Masalah ini juga tak terlepas dari lemahnya pengawasan BUMN. Ada kesan bahwa proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMN sering tidak transparan di Kantor Menneq BUMN. Akibatnya pengawasan tidak maksimal karena orang yang diberi tugas tak kredibel.

Single Cause

False Cause

Date: 10 December 2003

“Masyarakat Harus Selektif Isu Teror Madura”

Mantan menteri pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Mahfud MD mengemukakan, adanya data operasi teror dan pembunuhan dengan bayaran murah terhadap ulama di Madura.

Data yang menurut Mahfud cukup lengkap ini telah disampaikan ke Polda Jawa Timur, Oktober lalu. Tetapi tidak ada tanggapan. Untuk itulah ia berencana menyampaikan laporan tersebut kepada Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar.

Ia meminta agar data tersebut diperhatikan secara serius oleh kepolisian. Untuk

mencegah berulangnya kasus teror dan pembunuhan ulama di sejumlah daerah Jawa Timur tahun 1998-1999.

Pengungkapan data oleh Mahfud ini mengagetkan kita. Sebelumnya kita dikagetkan dengan pembunuhan Ketua DPC PKB Jatiroto KH Asmuni Ishak, yang hingga sekarang belum jelas perkaranya.

Walau tidak serta merta ada kaitan dengan pembunuhan tersebut, tetapi data yang diungkap Mahfud ini seolah memperkuat dugaan bahwa pembunuhan KH Asmuni Ishak ini bernuansa politik.

*Di samping itu, proses menuju pemilu 2004 ini seolah dalam bingkai kriminalisasi politik. Dan sasaran yang jadi korban adalah kiai, ulama, dan guru ngaji. Yang dikesankan sebagai basisnya PKB. Sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa sasaran teror ini adalah PKB.*

Slippery slope

Sekali lagi ini hanya kesan. Dan kesan ini lahir dari informasi yang carut-marut. Yang bisa saja kepentingan politik memasuki ranah kriminal.

Kepentingan politik apa? Bisa untuk teror dengan tujuan menyebarkan ketakutan rakyat agar tidak berpartisipasi pada pemilu. *Teror untuk menggembosi partai tertentu.*

Emotive language

Tetapi juga bisa politisasi kriminalitas justru untuk menaikkan pamor politik partai. Untuk mempercepat proses konsolidasi dalam tubuh partai itu sendiri. Dengan menciptakan isu lawan bersama, maka akan diperoleh konsolidasi.

Untuk itu kita berharap Mahfud MD tidak hanya melontarkan letupan sepotong-potong. Data yang sumir jangan keburu dilontarkan ke masyarakat. *Sebab dari cara pengungkapan Mahfud, sangat terkesan data yang dilontarkan masih sumir.*

Pengungkapan data yang sepotong dan masih sumir, punya potensi membingungkan masyarakat. Apalagi menyangkut tokoh masyarakat seperti kiai, maka hal demikian sangat sensitif.

Slippery slope

*Lihat saja di daerah-daerah sekarang, rumah kiai dan pondok pesantren mulai dijaga. Bagaimana dengan kiai kecil, guru ngaji yang tidak dijaga, apakah tidak menimbulkan ketakutan.*

Polisi kita harapkan lebih proaktif terhadap data yang dilontarkan Mahfud MD. *Polisi memiliki kemampuan menyeleksi data itu memiliki bobot atau hanya sensasi murahan.*

Emotive language

Kalau memang data yang dilontarkan Mahfud memiliki bobot kebenaran, maka polisi harus mengakui dan menindaklanjuti. Tidak perlu malu kedudukan masyarakat. Bukankah masyarakat memang mitra polisi.

Sebaliknya, kalau data yang dilontarkan Mahfud tidak memiliki bobot kebenaran yang signifikan, polisi harus berani menyampaikan ke masyarakat. Biar masyarakat yang menilai, isu teror di Madura itu sekadar promosi dan kampanye terselubung ataukah memang memiliki kebenaran.

Date: 12 December 2003

#### "Pemkot Pelanggar HAM Terbesar"

Survei Rakyat Miskin Kota menemukan data bahwa pemerintah kota atau pemerintah kabupaten merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar. Meliputi 70 persen dari seluruh kasus pelanggaran HAM.

Baru kemudian disusul institusi lain seperti perusahaan daerah pasar, polisi, dinas perhubungan, perusahaan swasta, pemerintah provinsi, majikan rumah tangga.

*Lantaran pelanggaran terbesar oleh pemkot atau pemkab, sangat wajar kalau kemudian yang menjadi korban mayoritas adalah pedagang kaki lima (PKL). Disusul warga stren kali, pedagang pasar, juru parkir, penghuni rumah susun, anak jalanan, sopir, warga kota, pembantu rumah tangga.*

Non sequitur

Data hasil survei di atas menunjukkan kecenderungan pemkot dan pemkab kembali kepada pola Orde Baru. Yaitu adanya kejahatan dan kekerasan state (negara) terhadap society (masyarakat).

Pada awal-awal zaman reformasi, kekerasan dan kejahatan state berkurang karena negara dalam keadaan tidak berdaya. Saat itu terjadi arus balik serangan dan 'balas dendam' masyarakat terhadap negara yang merepresinya selama Orde Baru.

Emotive language

*Sekarang negara seperti hendak balas dendam atas posisinya yang tidak berdaya; dikuyak-kuyak semasa awal-awal reformasi. Dan yang menjadi sasaran bukannya kelompok masyarakat yang dulu mengkritik negara, melainkan kelompok masyarakat yang lemah.*

Emotive language

*Maka terlihatlah PKL, warga stren kali, juru parkir, pedagang pasar yang menjadi korban. Mereka adalah kelompok masyarakat*

False cause

yang rentan. Yang tidak memiliki keberdayaan politis maupun hukum.

*Kita sering sekali menyaksikan bagaimana PKL yang karena terpaksa harus jualan di trotoar, digaruk, diganyang, diharu-biru sampai lunglai tak berdaya.*

Emotive language

Pemkot atau pemkab tahunya mereka itu melanggar aturan kota. *Padahal aturan itu dibuat tanpa mengindahkan nasib warganya.* Hanya semata-mata kepentingan elite dan gengsi pemerintah.

Emotive language, non-sequitur

Pemkot atau pemkab seperti tidak mau membuka mata bahwa PKL, pedagang pasar adalah latup perekonomian rakyat. Apalagi di saat perekonomian nasional terpuruk seperti sat ini.

Untuk itulah, kita mengharapkan pemkot atau pemkab melakukan gerakan mawas diri apakah sudah berfungsi sebagai pengembalian amanat penderitaan rakyat (ampera).

*Haruslah ingat, pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat. Mengangkat dan memperbaiki nasibnya. Bukan mengganyang, mengharu-biru.* Kebahagiaan negara adalah bila melihat rakyatnya hidup damai sejahtera. HAM-nya terjamin.

Emotive language

*Haruslah sadar bahwa dengan indikasi sebagai pelanggar HAM terbesar, maka pemerintah itu telah menjadi zalim. Berbuat aniaya. Kalau sudah begitu, jangan harapkan ada kepercayaan dari masyarakat. Jangan mimpi terjalin cinta kasih rakyat terhadap pemerintahnya. Jangan berharap Tuhan akan memberikan berkah kepada pemerintahan yang demikian.*

Emotive language, slippery slope

Date: 16 December 2003

“Tertangkapnya Saddam, Modal Baru Bush”

Mantan Presiden Irak Saddam Hussein dispatikan ditangkap 14 Desember di wilayah Tikrit, tempat kelahirannya. Ia ditangkap dalam suatu operasi ofensif dengan kekuatan 600 tentara AS.

Saddam tidak membuktikan janjinya untuk memberikan perlawanan sampai titik darah terakhir kepada Amerika. Ia menyerah dengan mudah.

Mantan tiran Irak itu ditangkap dalam kondisi sangat kelelahan. Badannya kurus. Ia hanya ditemani dua orang kawannya.

Penangkapan Saddam ini disambut dalam tiga versi. Versi pertama, sebagian menyambut dengan suka cita. Mereka menembakkan senjata ke udara. Bernyanyi dan

menari. Mereka adalah orang-orang yang merasa dizalimi Saddam selama berkuasa.

*Yang gembira pula adalah para 'boneka' Amerika di Irak yang menghambakan diri kepada Amerika. Dengan tertangkapnya Saddam, peluang mereka untuk segera membangun kekuasaan di Irak akan lebih cepat karena selama ini Saddam menjadi simbol perlawanan terhadap rezim baru boneka AS.*

Adapun versi yang berduka cita adalah rakyat Irak yang merasa Saddam adalah pahlawannya. Berkat tangan Saddam, Irak menjadi negara terbesar di lingkungan Arab. Saddam membawa Irak dalam kemakmuran.

Saddam memang keras. Sering kali mengabaikan hak asasi manusia saat berkuasa. Memerintah dengan tangan besi. Tidak toleran terhadap kritik.

Hal demikian memang tidak cocok dalam konsep Barat. *Tetapi mengacu pemikiran politik ahli-ahli Arab klasik, Saddam melakukan hal yang tepat karena bangsa Arab itu sulit dipersatukan. Terlalu banyak bicara sedikit kerja. Maka dibutuhkan pemerintahan yang kuat, keras.*

Dengan demikian, dalam konsep pemikiran Arab klasik, metode pemerintahan yang dipakai Saddam tidaklah sepenuhnya salah. Akan dinilai salah kalau yang digunakan ukuran Barat.

Yang jelas mendapat keuntungan dari tertangkapnya Saddam adalah Presiden AS George W Bush. Ia mendapat modal baru dan segar untuk maju ke pemilihan presiden tahun depan.

Bush sebenarnya sudah terpuruk dalam bursa presiden. Invasi yang dilanjutkan dengan menjajah Irak, memerosotkan popularitasnya. Apalagi dalihnya invasi bahwa Irak memiliki senjata pembunuh massal sama sekali tidak terbukti.

Ditambah kegagalan menangkap Saddam. *Bush benar-benar seperti bebek lumpuh, setelah gagal menangkap Osama bin Laden maupun penguasa Afghanistan Mullah Omar.*

Kemungkinan besar Bush akan memerintahkan agar Saddam diadili di AS seperti Presiden Panama Noriega. Akan memerintahkan Saddam dijebloskan ke penjara Guantamao yang angker.

Bush pasti khawatir kalau Saddam diadili dalam pengadilan terbuka di Baghdad, hanya akan mempermalukan AS. *Saddam pasti akan membuka betapa culasnya AS. Irak menghamba ke AS, tetapi begitu ada*

Emotive language

Non sequitur, hasty generalization

Emotive language

Emotive language

*kepentingan sendiri bersama Israel, AS menghancurkan hambanya sendiri.*

Emotive language

Dengan tertangkapnya Saddam, belum tentu perlawanan rakyat Irak terhadap AS menngendor. Sebab AS terlanjur dicap sebagai penjajah. Dan kenyataannya memang begitu. Kenyataan pula, dijajah AS tambah sengsara. Di Irak akan segera muncul Saddam-Saddam baru yang memberikan perlawanan tanpa akhir. Seperti semboyan kita pula: Patah satu tumbuh seribu.

Date: 18 December 2003

“Tugas Baru Manajemen BNI”

Setelah ramai dengan masalah pembobolan, Bank BNI berbenah dengan memilih anggota dewan komisaris dan direksi PT Bank BNI. Dari anggota yang terpilih dan beragam mengisyaratkan tekad untuk mengembalikan institusi ini kepada jalurnya. Nampaknya kehadiran orang-orang luar akan memudahkan pembenahan dalam bank tersebut.

Problem yang harus ditangani pada bank yang punya hubungan dengan kemerdekaan bangsa ini sudah diketahui yakni, perbaikan pengawasan internal. Masalah ini menyangkut perbaikan peraturan dan mentalitas manusianya.

Bank bobol terjadi karena situasi yang memungkinkan serta tersedianya peluang. *Pengawasan sangat lemah karena sikap tegas bukan kepribadian dari bangsa ini.* Yang lebih sering mengemuka adalah sikap permisif atau berdamai terhadap kesulitan dan kesalahan.

Non sequitur

Kalau mau diurut, jumlah penyelewengan di sektor perbankan memang jauh lebih besar ketimbang dana yang digunakan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) untuk membuat pesawat terbang. Hanya bedanya, penggunaan dana IPTN dikaitkan dengan isu politis.

Perkembangan ekonomi sejak 1970-an tidak lepas dari peran perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Peran perbankan makin menonjol setelah pemerintah menerbitkan kebijaksanaan yang mengizinkan pendirian bank baru dengan modal setor yang sangat minim Rp 10 miliar. Tujuannya cukup ideal yakni membuat masyarakat menjadi bank minded dan menggiatkan perekonomian.

Tetapi sisi pengawasan yang dilakukan otoritas moneter sangat lemah sebab penambahan jumlah bank baru tidak diimbangi dengan peningkatan tenaga pengawas dan peraturan yang memadai.

Sementara unit pengawas yang diharapkan tidak tersentuh, malah turut senang bermain bayang-bayang. Beberapa bank yang sahamnya juga dimiliki Bank Indonesia malah turut kejoblos.

Karena itu Dewan Direksi dan Komisaris PT Bank BNI Tbk bagaimanapun harus melakukan terobosan efektif dan bijak agar BNI menjadi lebih sehat. Dalam kontes ini, pembenahan tentu tidak bisa bersifat merata karena tak semua divisi atau karyawan BNI membawa bakat penyelewengan.

Pembenahan ke dalam, sepertinya merupakan sebuah sasaran antara guna menciptakan Bank BNI yang mampu menjalankan fungsi-fungsi perbankan dengan semestinya. Misalnya, fungsi intermediasi yang selama ini sulit dilakukan perbankan pada umumnya.

Secara ideal, manajemen baru juga harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa mengemudikan bank ke arah yang lebih baik sekalipun tanpa orang asing di dalamnya. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pun mampu bekerja dan punya kemampuan sederajat dengan bangsa lain.

Date: 26 December 2003

“Beratnya Menjadi Caleg”

Calon legislatif saat ini boleh dikatakan super sibuk mempersiapkan dirinya menjelang Pemilu 2004. Mereka saat ini sibuk-sibuknya mengurus surat-surat untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diberikan oleh KPU.

Ruwetnya persyaratan ini antara lain karena tidak jelasnya persyaratan yang diajukan KPU. Contoh. Apakah surat tanda kelakuan baik cukup diperoleh di kantor polisi setempat atau harus ke pengadilan? Pengadilan tingkat apa?

Persyaratan lain juga bisa bikin puyeng. Seorang caleg memerlukan surat kesehatan. Menurut KPU sudah ada formulir standar, nomor BB&. Nyatanya, formulir nomor BB 7 itu tidak tersedia di seluruh penjurur tanah air yang luas ini. Lagi pula, rumah sakit mana yang berwenang mengecap dan mengesahkan formulir tersebut? Di beberapa daerah terpencil, bagi seorang caleg tidak begitu mudah untuk pergi ke rumah sakit tingkat provinsi, umpamanya.

Dan inilah penyakit utama di negeri ini yakni masalah birokrasi. Untuk Pemilu 2004 birokrasi yang terkait untuk mengembangkan demokrasi cukup rumit.

Kita berasumsi KPU bersikap tulus dalam mengeluarkan berbagai persyaratan dan

peraturan yang harus dipenuhi seorang caleg. Namun agaknya para anggotanya agaknya tidak sempat memikirkan secara tenang dan realistis kesulitan yang dihadapi di lapangan. Mungkin juga dikeluarkan terburu-buru karena didesak waktu, sehingga peraturan dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang.

Menyelenggarakan demokrasi di negara kepulauan yang paling luas di dunia (meliputi wilayah, kalau dibandingkan, yang membentang dari London sampai Ankara) dan melibatkan sekitar 140 juta pemilih, jelas, bukanlah tugas yang mudah.

Karena itulah sekarang bukanlah teori-teori politik tentang demokrasi yang diperlukan. Semua pihak harus menunjukkan kesediaan untuk memperlancar proses penyusunan caleg untuk berbagai lembaga perwakilan, terutama perwakilan tingkat kabupaten.

Yang terjadi, ada saja kecenderungan pada diri orang pejabat atau petugas untuk mempersulit sebuah proses yang harus dipenuhi. Seakan-akan usaha demokratisasi yang ingin didorong belum berkenan bagi pejabat atau petugas.

Daftar caleg sangat penting dan menentukan. Sebab, berbeda dengan pemilihan umum di masa silam, di kotak suara 5 April 2004, pemilih tidak hanya berhadapan dengan nomor urut dan tanda gambar partai.

Ketokohan sang calon menjadi faktor yang turut menentukan perolehan suara sebuah partai di suatu wilayah pencoblosan. *Tetapi kalau persyaratan caleg sedemikian ruwet jangan-jangan caleg yang berkualitas akan gagal dan sebaliknya caleg yang avonturir politik yang berhasil. Kalau ini terjadi Pemilu 2004 benar-benar tragis.*

Slippery slope

Date: 29 December 2003

“Parpol Perlu Rekening Khusus”

Akankah Pemilu 2004 nanti bebas dari praktik politik uang? Nampaknya hal itu masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya belum ada UU yang mengatur tentang rekening khusus dana kampanye.

Padahal menurut beberapa pengamat, kepemilikan dana rekening khusus kampanye merupakan syarat partai politik siap mengikuti pemilihan umum.

Tetapi saat ini hal itu menjadi sulit karena Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur hal itu.

Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Kamis, UU Nomor 31/2002 tentang Partai Politik memang tidak menyebutkan soal sanksi bila parpol tidak memiliki rekening tersebut. Sehingga, untuk Pemilu 2004, parpol bisa dengan mudah melenggang ke arena pemilu tanpa harus memiliki rekening tersebut.

Memang parpol sudah menyerahkan nomor rekening, tetapi tak ada satu pun dari parpol-parpol itu yang melaporkan jumlah saldo awal yang dipunyai. Yang ada hanya nomor rekening dengan jumlah dana kosong.

Saldo awal ini penting dan bisa menjadi persoalan tersendiri. Sebab, dari situ sesungguhnya bisa dilacak asal-muasal dana kampanye, apakah dari sumber legal atau sebaliknya.

Masalah saldo awal ini juga bisa-bisa dijadikan alasan atau cara parpol berkelit jika, karena kita tahu bahwa ada pembatasan sumbangan dana bagi parpol. Artinya, bisa saja, parpol mengalihkan dana sumbangan parpol masuk ke rekening dana kampanye. Jelas tanpa adanya aturan ini parpol bisa memperoleh cara bagaimana pengalihan dana itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum.

Maka dari itu, bertolak dari pertimbangan akan makin sulitnya menuntaskan persoalan dana parpol dan dana kampanye, maka kita bila UU Parpol mesti diamandemen dengan memasukkan sanksi tegas soal rekening khusus dana kampanye. Jika tidak maka permainan politik uang sulit dibendung.

*Jika politik sogok-menyogok betlangsung bisa juga terjadi apa yang disebut dengan sistem rente ekonomi antara penguasa, elit politik, dan pengusaha. Dalam sistem ini partai memanfaatkan pengusaha, sebaliknya pengusaha yang sudah menginvestasikan dana dalam jumlah besar pada partai akan kembali menuntut berbagai agar investasi yang sudah ditanam kembali.*

Jika itu terjadi, maka oligarki partai tidak bisa dielakkan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan mewabah sementara rakyat akan terpinggirkan. Untuk itulah kita semua harus mewaspadaai keadaan ini. Masyarakat dan LSM bisa bekerja sama agar dana yang digunakan parpol transparan. Kemudian kita juga berharap pada proses

Slippery slope

penegakan hukum jika namar ada partai-partai mendapat dana ilegal. Dan sekali lagi belajar dari kasus ini, maka UU perlu diamandemen agar soal dana parpol ini bisa diawasi secara ketat

Date : 30 December 2003

“Partai Politik Abaikan Etika”

Pemilihan umum (pemilu) 2004 masih beberapa bulan lagi. Belum masanya berkampanye. *Tetapi pada kenyataannya kita menyaksikan parpol mencuri start dengan melakukan kampanye.*

Hasty generalization

Kita melihat di mana-mana bendera, umbul-umbul, gambar parpol dipasang. Di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, di rumah-rumah pribadi, di atas pohon. Pola pemasangannya menunjukkan adanya persaingan, perlombaan secara ketat dan besar-besaran.

Di samping itu, parpol mulai melakukan kegiatan pengerahan massa. Ada yang dikemas dalam halalbihalal, ulang tahun partai, istigotsah, temu kader. *Apa pun namanya, yang jelas kita lihat adalah bentuk kampanye secara terselubung.*

Emotive language

Persaingan dan perlombaan ini telah menyentuh kerawanan berupa konflik antarmassa parpol. Di Jember, bendera partai Golkar dibakar orang tidak dikenal.

Golkar mengancam akan membalas. Kalau nanti Golkar benar-benar membalas, dipastikan suhu politik menjadi panas dan cenderung mendidih..

Kita juga melihat kegiatan partai politik yang cukup provokatif. Misalnya menyelenggarakan kegiatan pengerahan massa di daerah yang dikenal sebagai basis partai lain. Hal demikian akan sangat mudah menyukut konflik antarmassa parpol.

Kampanye terselubung juga dibumbui dengan sikap arogan parpol. Di Madura misalnya, ada partai yang mengklaim suatu kawasan tertentu hanya untuk benderanya. Ada partai yang melakukan pemaksaan kepada rakyat agar memasang bendera dan gambar partai tersebut.

*Apa yang dilakukan parpol sekarang jelas-jelas mengabaikan etika politik.* Dalam arti sengaja melanggar aturan. Melanggar tata krama hidup berbangsa dan bernegara.

Hasty generalization

Kalau sudah begitu, kita hanya bisa prihatin dan bertanya, mau dibawa ke mana bangsa ini oleh partai politik?

Kita sebenarnya berharap, partai politik akan menjadi ujung tombak pengentasan bangsa ini dari keterpurukan. Melalui kiprah politik yang jujur, adil. Melalui pemikiran yang visioner. Melalui sikap kenegarawanan, dalam arti mengedepankan kepentingan bangsa secara luas. Bukan hanya kepentingan kelompok dan golongan.

Tetapi dengan realitas yang ada, kita jadi pesimistis bangsa ini akan terentas dari keterpurukan. Lihat saja, parpol memberikan contoh perilaku tidak jujur. Praktik mencuri start menunjukkan parpol tidak memiliki pemikiran yang visioner. Parpol tidak mengedepankan kepentingan bangsa secara luas.

Untuk itulah kita berharap parpol mau mengendalikan diri untuk tidak melanggar etika. Parpol harus memiliki paradigma bagaimana menang secara bermartabat. Bukan menang karena menghalalkan segala cara.

Dari situlah kita boleh berharap terjadinya pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sebab, mustahil terjadi demokrasi jika tidak ada etika politik. Pelanggaran etika politik hanya akan melahirkan destruksi politik baru yang susul menyusul.

Date : 5 January 2004

“Antisipasi Sapi Gila”

Sapi gila (mad cow) menyerang Amerika Serikat. Penyakit mematikan yang masa inkubasinya bisa mencapai 16 tahun itu pernah menyerang Inggris dan Kanada. Banyak negara di dunia yang menggantungkan impor daging sapi dari negeri adidaya itu.

Amerika kemudian menuding Kanada sebagai negara yang mengirim penyakit itu ke AS, tetapi tetap saja puluhan negara yang selama ini mengimpor daging sapi dan turunannya dari Amerika menolaknya.

Negara yang menghentikan impor daging AS antara lain Jepang, Meksiko, Korsel, China, Hongkong, Kanada, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Rusia, Brasil, Uni Emirat Arab, Peru, Paraguay, dan 15 negara Uni Eropa.

Yang perlu digarisbawahi sapi gila tidak hanya masalah daging, tetapi juga akan berimplikasi pada produk-produk turunannya seperti susu dan keju.

Kebutuhan daging sapi Indonesia memang tidak bergantung pada AS, tetapi pada Australia. Namun, produk-produk turunannya

cukup banyak beredar di Indonesia seperti dibuktikan saat sweeping di berbagai supermarket oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, kita mesti cepat menyikapi sapi gila Amerika itu.

Indonesia dalam menyikapi soal sapi gila memang agak terlambat. Senin (29/12), pemerintah baru mengumumkam sikap resminya. Padahal, penjelasan kepada masyarakat sungguh perlu sesegera mungkin. Namun, herannya, belum ada satu pun orang yang punya otoritas dalam bidang itu secara resmi bicara. Menjelaskan kepada publik.

Padahal soal sapi gila itu sudah merebak seminggu sebelumnya. Anehnya, seperti kata Kepala Badan Karantina Pertanian Triakoso, pihaknya belum melakukan langkah apa pun untuk mengantisipasi masuknya daging sapi impor Amerika. Alasannya, masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan instansi terkait.

Kita memang perlu hati-hati mengeluarkan pengumuman itu karena akan berimplikasi luas menyangkut dunia bisnis. Namun, mestinya jangan lambat karena negara lain cepat melakukan antisipasi melindungi konsumen mereka.

Kita memang belum punya catatan soal sapi gila. Namun, siapa yang bisa menjamin daging sapi gila kini belum memasuki wilayah negara kita? *Karena pasti harganya lebih murah.* Dan, biasanya sesuatu yang murah menjadi daya tarik konsumen, tanpa memikirkan risikonya.

Dulu kita pernah punya catatan dengan paha ayam AS. Paha ayam yang ditolak oleg beberapa negara, mengandung kolesterol tinggi diterima di Indonesia. Padahal, masyarakat menolaknya. Dalam soal ini konsumen menjadi korban. *Dua kali pengalamam rasanya cukup agar di masa datang kita harus cepat bertindak, karena bukannya tak mungkin produk-produk rekayasa genetika yang belum jelas keamanannya menyerbu pasar kita.*

Non sequitur

Non sequitur, emotive language

Date : 9 January 2004

“Makna Kemenangan Mutlak Maschut”

Pasangan Maschut-Edianto menang mutlak dalam pemilihan Wali Kota Kediri. Dari 30 kursi yang ada di DPRD, Mschut mengantongi suara 29. Satu suara direbut pasangan Sujud Kendar-M Zaini. Sedang

pasangan Bambang Supriyono-Yulianto tidak memperoleh suara sama sekali.

Soal Maschut bakal menang, sudah dapat diprediksi jauh hari. Karena kinerjanya dinilai cukup baik oleh masyarakat. Dengan gayanya yang low profile, dia bisa menggerakkan potensi masyarakat.

Ia juga pintar menyenangkan hati masyarakat. Contohnya bagaimana sukses dia mengembangkan Persik Kediri menjadi juara Divisi Utama Liga Pro Indonesia. Prestasi Persik yang spektakuler telah mengangkat citra dan kebanggaan masyarakat Kota Tahu ini.

Indikator-indikator sosial dan ekonomi memang mengalami perbaikan selama dipegang Maschut. Pembangunan infrastruktur bertambah sehingga kiprah pemerintahannya dirasakan rakyat.

Hubungan Maschut dengan DPRD sangat baik. Sejak awal sudah terdengar kabar bahwa partai-partai kunci seperti PDIP dan PKB akan memilih dia.

Dengan dukungan lahir-batin dari rakyat, maka insya Allah Maschut akan selamat dan sukses menjalankan pemerintahannya periode kedua ini.

Yang mengejutkan adalah kemenangan mutlak. Ini spektakuler. Ini yang tidak diduga sebelumnya. Ini yang pertama kali terjadi dalam sejarah pilwali di Indonesia selama zaman Reformasi.

Bahkan pada zaman Orde Baru pun tidak pernah terjadi. Walaupun saat itu selalu ada calon utama dan calon pendamping. Biasanya calon pendamping tetap diberi suara dua atau tiga.

Atas kemenangan mutlak ini kita bisa menangkap makna bahwa suara sekarang tidak bisa secara ketat diatur dengan sistem jatah seperti Orde Baru.

Buktinya, Fraksi Partai Golkar sendiri tidak bisa memaksakan anggotanya untuk memilih jagonya, Bambang Supriyono. *Sehingga terkesan, Golkar telah dengan semena-mena mengorbankan Bambang untuk menerima aib yang sangat berat.*

**Emotive language**

Makna lain yang harus kita simak dari kemenangan mutlak ini adalah peringatan dari Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung dikorup. Semakin mutlak kekuasaan semakin mutlak pula korupsi.

Dengan kemenangan mutlak ini berarti hubungan Maschut dengan dewan akan sangat baik. Dewan yang memilih pasti akan berusaha mengamankan sampai selesai lima tahun.

*Ini akan berbahaya kalau dalam mengamankan dewan meminta konsesi. Dewan meminta imbal jasa. Maka yang akan terjadi adalah persengkokolan antara legislatif dan eksekutif.* Bapak Amerika, Benyamin Franklin pernah memperhitungkan, bahaya demokrasi apabila eksekutif dan legislatif bersekongkol.

Untuk itu, kita mengharap Maschut tidak sampai masuk perangkap persengkokolan demikian. Sejak awal harus sadar bahwa kiprahnya tidak cuma dipertanggungjawabkan kepada dewan, tetapi yang lebih utama adalah kepada rakyat.

Kita berharap Maschut tidak sampai lupa. Menjadi arogan. Melainkan tetap istiqamah dengan sikap dan perilakunya seperti selama ini, yaitu low profile, sahaja, rendah hati, mendulur dengan msyarakat. Tetap eling lan waspada. Sehingga cintanya rakyat Kediri kepada dia benar-benar lahir tumusing batin.

Slippery slope

Date: 16 January 2004

“Undian Olahraga”

Undian Promosi Menonton Pertandingan Olahraga, nampaknya jadi dilaksanakan. Menurut Mensos Bachtiar Chamsyah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 673/HUK-UND/2003 izin yang diberikan Departemen Sosial adalah izin undian gratis bagi penonton pertandingan olahraga dan pelaksanaannya mulai 1 Februari mendatang.

Dalam surat disebutkan, peserta undian yang menonton pertandingan olahraga di tempat pertandingan yang ditentukan, dengan terlebih dahulu membeli tiket. Kemudian, akan memperoleh nomor undian gratis berhadiah secara otomatis yang dicatat melalui sistem komputer on line.

Undian itu berhadiah utama televisi 29 inci, lemari es, dan uang tunai Rp 600.000. Sedangkan hadiah kedua berupa uang tunai Rp 1.500.000 dan Rp 200.000.

Nilai hadiah sekali penarikan (penarikan sekali seminggu) Rp 2 miliar dan dilaksanakan sebanyak 52 kali penarikan sehingga total hadiah Rp 104 miliar. Dari jumlah ini, Departemen Sosial mendapat 10 persen yang merupakan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana itu dipergunakan untuk berbagai

kegiatan kemanusiaan dan diaudit oleh akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pro-kontra masalah ini memang cukup ramai. *Umumnya tidak setuju dengan undian karena berbau judi.* Ketidaksetujuan itu benar, karena kita tahu bahwa hanya akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat kecil.

Non sequitur, emotive language

Kita semua tentu ingin prestasi olahraga kita muncul di kancah internasional. Olahraga kita memang dalam tahun-tahun ini sangat merosot prestasinya. Di negara-negara ASEAN saja kita sudah sulit bicara.

Salah satu kendala dalam hal peningkatan prestasi olahraga memang dana. Tanpa dana memang sulit mengharapkan olahraga kita maju. Sarana dan prasarana membutuhkan dana, belum lagi jika ingin optimal kita harus menghadirkan iptek sebagai penunjang. Semua itu butuh dana.

Tetapi kita juga tahu bahwa masalah pendanaan sebenarnya juga bisa diatasi dengan cara-cara kreatif. Salah satu cara yang mudah dengan meminta sumbangan. *Namun cara ini sudah tidak banyak dimaui oleh penyumbang mengingat sumbangan entah melalui PMI, stiker an model lain selalu saja diselewengkan penyelenggaranya.*

Straw argument

Cara lain yang sebenarnya ampuh bisa dilakukan kalangan olahraga sendiri dengan meningkatkan prestasi olahraga itu sendiri. Jika prestasi bagus maka olahraga bisa menjadi sportainment yang akan mendatangkan sponsor dengan sendirinya.

Jika ini terjadi tak perlu lagi sumbangan atau kupon undian dan semacamnya yang dalam praktiknya belum tentu pengelolaannya ransparan dan baik. *Bahaya lain, kupon yang direncanakan kali ini bisa diboncengi togel.*

Slippery slope, emotive language

Date : 19 January 2004

"Kotak Pemilu"

Kotak suara pemilu pesanan KPU nasibnya agak simpang siur. Kotak suara yang berjumlah 2,1 juta dan terbuat dari alumunium itu dikhawatirkan tidak dapat selesai pada waktunya.

Hal ini antara lain terjadi disebabkan fluktuasi harga material kotak sehingga biaya produksi tak dapat lagi ditutup oleh nilai kontrak yang ditandatangani.

Mencari alternatif lain, misalnya impor kotak built up dari negara eksportir juga sulit. Kabarnya stok hanya tersedia di China dan itu pun dalam jumlah yang jauh dari memadai dari apa yang kita perlukan. Mengganti material kotak suara misalnya dengan kayu lapis terbentur pada masalah prosedural yang dengan sendirinya memakan tempo. Paling tidak perlu tender baru.

Masalah lain muncul, karena perusahaan pemenang tender menjual perusahaannya ke tangan orang lain. Akibatnya kepastian pembuatannya juga menjadi terancam karena membuat kotak pemilu dalam jumlah besar tidak mudah.

KPU memakai material aluminium, dengan harapan agar dapat dipergunakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Karena selama ini, tiap kali pemilu pemerintah memesan kotak suara baru yang terbuat dari kayu, sedangkan nasib kotak suara lama tidak jelas lagi.

Ambil contoh negara-negara Asia Selatan yang menggunakan kotak suara dari besi yang dapat digunakan dari pemilu ke pemilu. Pemerintah bersangkutan hanya menambah kekurangannya saja, sesuai dengan penambahan populasi pemilih. Dengan demikian anggaran negara dapat dihemat.

Persoalannya, apakah kotak suara yang sangat vital perannya itu dapat selesai pada waktunya, mengingat apa yang telah dikemukakan di atas? Jika masalah kotak suara berlarut-larut maka dikhawatirkan ini akan mengganggu agenda pemilu dan menjadi pemicu konflik.

Tampaknya masalah teknis ini kurang dipikirkan masak-masak oleh KPU, termasuk masalah pengamanan berkas-berkas caleg.

Seperti diberitakan media massa, banyak berkas caleg yang tercecer dan bahkan hilang. Pihak KPU mengatakan ini adalah human error. Yang pasti, hal ini menguatkan kesan dalam masyarakat persiapan Pemilu 2004 jauh dari rapi. Orang yang sudah patah selera dengan Pemilu 2004 benar-benar menjadi kehilangan nafsu.

KPU yang sekarang ini memang bukan dari kalangan politisi. *KPU yang sekarang adalah dari kalangan perguruan tinggi. Barangkali karena bukan praktisi mereka agak lamban dalam kinerja dan terjebak main teori-teori melulu.*

Suka atau tidak suka jika kotak pemilu ini gagal dibuat dan didistribusikan tepat pada waktunya, persiapan pemilu yang gegap gempita akan percuma. Jadwal pemilu kemungkinan

Non sequitur, emotive language

harus diundur dan ini bisa menimbulkan kekacauan. *Tetapi jangan sampai KPU terus mengambil kotak amal yang ada di pinggir jalan karena ini juga tak waras, atau malah menjadikan kotak pemilu kotak ajaib yang bisa menyulap suara.*

Emotive language

Date: 20 January 2004

“Warga Tionghoa Jangan Dijadikan Sapi Perahan”

Ada pernyataan menarik dari Perhimpunan Indonesia Warga Tionghoa (INTI) agar partai politik (parpol) tidak menjadikan mereka sebagai sapi perahan. Dalam arti mereka hanya hendak dipeloroti uangnya.

Mereka sudah belajar dari pengalaman setiap pemilihan umum (pemilu). Mereka memang didekati, dirangkul, tetapi ternyata itu hanya untuk diserap uangnya.

Pernyataan itu membuka perspektif kita bahwa ada kesadaran baru dari kalangan warga Tionghoa, untuk memberikan kontribusi politik kepada bangsa ini secara lebih bermakna.

Makna yang bagaimana? Yaitu partisipasi politik tidak hanya dalam bentuk uang. Melainkan keterlibatan bersama komponen masyarakat lain dalam mengelola arah perkembangan bangsa ini.

Masalahnya, apakah selama ini mereka benar-benar cuma jadi sapi perahan? Kita melihat tidak seluruhnya benar.

Untuk mayoritas warga Tionghoa, khususnya yang perekonomiannya menengah ke bawah, barangkali ada benarnya. Tetapi untuk warga Tionghoa kelas ekonomi tinggi seperti para konglomerat, rasanya tidak tepat.

Kontribusi uang warga Tionghoa ekonomi tinggi, mendapatkan imbal balik politik seperti kebijakan yang menguntungkan mereka. Mendapatkan proteksi politik untuk menggelembungkan bisnisnya.

Kita bisa melihat banyak konglomerat warga Tionghoa yang dibesarkan oleh imbal balik politik. Terutama di zaman Orde Baru. *Sehingga mereka bukanlah menjadi bisnis yang kuat karena tumbuh dari bawah, melainkan bisnis yang semu. Konglomerasi yang rapuh.*

Emotive language

Terbukti, mereka rawan jatuh. *Bahkan kalau kita mau jujur, dari merekalah berbiak penyakit ekonomi nasional seperti kredit macet, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).*

Emotive language

Karena mereka tumbuh dan besar dari proteksi politik, maka tatkala proteksi dianggap tidak lagi kuat maka mereka membawa asetnya

ke luar negeri.

Naga-naganya setelah Orde Baru jatuh, maka kembali memainkan pola yang sama unyuk mendapatkan proteksi dari rezim yang berkuasa maupun dari partai politik.

Terlepas adanya kesilapan dari INTI dalam mempersepsi posisi warga Tionghoa, kita tetap menghargai pendapat INTI agar warga Tionghoa tidak dijadikan sapi perahan.

Memang begitu seharusnya. Tidak enak dijadikan sapi perasan terus-menerus melalui tekanan politik. Bahkan diskriminasi politik.

Untuk itu, sekarang kembali kepada warga Tionghoa sendiri apakah masih akan menggunakan pola lama yaitu justru mencari proteksi politik, entah kepada rezim yang berkuasa maupun partai politik.

Terus terang, gejala ini masih sangat kuat. Banyak pengusaha Tionghoa yang mebagi-bagikan dana kepada pelbagai partai politik. Harapannya, mendapat proteksi. Mendapat kemudahan.

*Tentu saja sasaran utama adalah kalau partai itu berkuasa, bisa membentuk aliansi strategis yang disebut "pangausaha" yaitu antara penguasa dengan pengusaha.*

Slippery slope

Date: 21 January 2004

"Ijazah Palsu Caleg"

Banyak sudah caleg berguguran. Banyak alasan soal gugurnya caleg ini. Salah satu yang muncul di permukaan adalah sempitnya waktu melengkap berkas dan tipisnya kemungkinan menjadi caleg.

Namun banyak juga para caleg yang sebenarnya gagal melegnkapi syarat kerana tidak memiliki ijazah. Sebagian lagi, di seluruh Indonesia para caleg coba-coba memalsukan ijazah.

Mereka itu jumlahnya mencapai ribuan. Panwaslu mengaku kewalahan bila meneliti satu per satu ijazah para caleg yang terindikasi palsu itu.

Mengapa banyak caleg yang memalsu ijazah, salah satunya kerana cara ini tidak sulit.

Sekolah-sekolah yang menjadi benteng integritas banyak yang rela menjual ijazah. Mereka menemukan pasar gelap yang empuk di tangan pencari kerja maupun pengejar status.

Nah, jika caleg-caleg ini berhasil lolos menjadi wakil rakyat, bisa diduga bagaimana mutu dan moralitasnya. Padahal, lembaga legislatif dari waktu ke waktu harus menjadi badan politik yang bersih.

Para caleg yang memalsukan ijazah jelas memiliki sikap tidak tukus. Mereka seharusnya dikategorikan juga sebagai politikus busuk oleh gerakan antipolitikus hitam yang kini merebak dimana-mana.

Karenanya KPU harus mencoret para caleg yang diketahui berijazah palsu itu. Karena, apa pun alasannya, tidak bisa dibenarkan seorang wakil rakyat memanipulasi ijazah, sertifikat yang menandakan seseorang memiliki kecerdasan dan kompetensi tertentu. Kalau kompetensi diri bisa dipalsukan, apalagi yang tidak bisa?

Kepada para pemilik ijazah palsu itu, sanksinya tidak cukup hanya digugurkan pencalonannya. Mereka juga harus dihukum karena pemalsuan itu. Termasuk yang harus dihukum berat adalah pejabat atau lembaga yang mau mengeluarkan ijazah palsu. Masalahnya, para caleg itu berasal dari partai-partai.

Partai-partai politik rupanya belumbisa diandalkan sebagai penegak citra. Parpol bukan gerbang penjaga integritas dan moralitas bangsa. *Ribuan ijazah palsu yang ditemukan dari para caleg menunjukkan bahwa parpol justru menjadi atau dijadikan rimba kepalsuan dan pemalsuan.*

Kalau ini diteruskan maka kerusakan mentalitas bangsa ini telah demikian parahnya, sehingga kita mungkin tidak tahu lagi harus memulai dari titik mana untuk memperbaikinya.

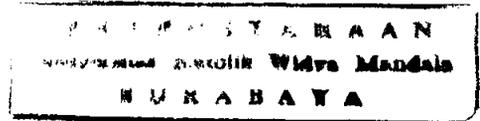
Gerakan antipolitikus busuk yang kini merebak adalah salah satu cara menumbuhkan budaya maku. Kalau mereka tetap saja tidak tahu malu, gerakan ini tidak boleh berhenti, dan harus terus diupayakan agar masyarakat semakin sadar bahwa tidak boleh ada lagi wakil rakyat yang moralitasnya diragukan dan tak berkualitas.

Date: 23 January 2004

"Pelajaran Dari Petro Widada"

Pabrik Petro Widada meledak dan terbakar, akibatnya dua orang dinyatakan tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka. Korban material juga cukup banyak karena puluhan kendaraan bermotor juga hangus terbakar.

Asal terjadinya ledakan dan kebakaran belum jelas dikarenakan kejadian berlangsung cepat dan tertutup asap tebal. *Pabrik yang memproduksi bahan kimia phthalic anhydride-bahan dasar pembuat plastik memang cukup*



Emotive language

Non sequitur

*mengagetkan kita semua karena jarang terjadi sebuah pabrik mengalami kecelakaan seperti itu*

Kebakaran setelah ledakan terjadi berlangsung cepat karena bahan kimia ini tergolong bahan intermediate yang bisa digunakan untuk pembuatan bermacam-macam senyawa kimia.

*Cairan ini, lanjutnya, memiliki tingkat bahaya cukup tinggi.* Ini dikarenakan cairannya cukup pekat, sehingga apabila terbakar akan menimbulkan ledakan yang cukup hebat dan sulit dipadamkan oleh air. Dan penyebab kebakaran tersebut diantaranya, bahan kimia disimpan dalam tekanan dan suhu tinggi.

Kita semua tentu tidak menginginkan kecelakaan semacam ini terjadi lagi. Karena itulah harus dilakukan penyelidikan atau investigasi menyeluruh soal kebakaran Petro Widada.

Hal pertama yang rasanya harus diteliti adalah masalah prosedur. Perusahaan kimia pada umumnya memiliki prosedur tertentu yang sangat ketat.

Dan kalau itu dipatuhi, maka kecelakaan akan bisa diminimalisir. Maka jika terjadi kecelakaan berarti ada prosedur yang dilanggar atau diabaikan.

Adanya prosedur yang dilanggar itu biasanya bersumber dari kelalaian karena sistem yang bekerja di sebuah perusahaan sudah menjadi rutinitas. Akibatnya para pengelola tidak memberikan perhatian yang tinggi terhadap bahaya yang akan timbul.

Peristiwa yang menimpa Petro Widada bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya tahun 2002 lalu pernah terjadi hal serupa tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang besar.

Hal lain yang harus kita cermati adalah dampak bagi lingkungan. Mestinya kita harus mengkaji ulang dengan peristiwa yang menimpa Petro Widada.

Lingkungan pabrik kimia yang berdekatan dengan permukiman jelas menimbulkan kerawanan. Banyak kasus kecelakaan yang menimpa industri kimia dampaknya tidak dirasakan saat terjadinya kecelakaan tetapi baru terlihat pada beberapa tahun kemudian.

Karena itulah, jika pabrik ini kemudian akan didirikan kembali aspek-aspek ini harus mendapatkan perhatian serius dan bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi semata.

Tak kalah penting adalah pemerintah daerah harus juga menyiapkan diri menghadapi kecelakaan yang menimpa industri di wilayah Gresik. Korban bisa ditekan jika pemerintah daerah menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan akibat kecelakaan seperti di Petro Widada.

Date: 27 January 2004

“Pembangunan Nipah Jangan Lagi Berdarah”

Pembangunan Waduk Nipah di wilayah Kabupaten Sampang (Madura) menurut rencana akan dihidupkan kembali. Proyek ini macet setelah terjadi penembakan oleh aparat terhadap rakyat yang hendak memprotes pembangunan waduk itu.

Peristiwa pada 25 September 1993 itu menewaskan tiga orang warga dan beberapa cedera.

Sejak itu, pemerintah mau mengalah. Tidak dengan serta merta hendak memaksakan proyeknya ke masyarakat. Pemerintah tahu, bahwa rakyat tidak bisa diperlakukan secara keras apalagi kasar karena masyarakat akan mereaksi dengan sikap yang lebih keras.

Untuk itulah pemerintah memilih melakukan pendekatan secara persuasif. Bupati Fadhilah Budiono memiliki kemampuan itu. Ia rajin silaturahmi ke kiai dan tokoh masyarakat menjual rencana tersebut.

Fadhilah tahu persis adat istiadat Madura. *Kiai dan tokoh masyarakat adalah seperti kepala pada seekor belut. Kalau kepalanya sudah dipegang, maka ekornya akan mengikut.*

False analogy

Kita melihat perubahan pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan suatu yang positif. Hal demikian sejalan dengan konsep pembangunan dari bawah ke atas atau bottom up.

Hal demikian senapas dengan pola pembangunan yang berwatak partisipatif. Artinya, masyarakat terlibat secara penuh dan strategis sejak penyusunan konsep, pematangan rencana, sosialisasi rencana sampai pelaksanaan pembangunan dan evaluasi.

Pola demikian harus dilakukan secara jujur. Sebab ada yang begitu keras menyuarakan pola pembangunan partisipatif tetapi dalam praktiknya bersifat semu.

*Rakyat dijebak dalam keseolahan. Rakyat seolah sudah diajak bicara, padahal cuma dijejali konsep. Rakyat seolah sudah dilibatkan dalam perencanaan, padahal cuma dipakai legitimasi. Rakyat seolah sudah dilibatkan dalam*

pelaksanaan, padahal cuma jadi makelar material pembebasan tanah.

Melihat posisi Madura sekarang, pembangunan waduk merupakan kebutuhan mendasar. Seringkali Madura, khususnya daerah Sampang, kesulitan air bersih pada musim kemarau. Sementara terjadi banjir di musim hujan.

Tidak adanya dukungan air membuat pembangunan irigasi teknis sulit. Hampir tidak ada lahan beririgasi teknis di Sampang. Pertanian dikembangkan di atas lahan sawah tadah hujan atau tegalan.

Kendati pembangunan waduk merupakan kebutuhan, kita perlu mengingatkan agar pelaksanaannya tetap berpijak pada nilai kesabaran. Pemerintah harus sabar ngemong rakyat.

Di samping itu, kita ingatkan agar dalam proses pembangunan ini tidak menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Misalnya dalam pembebasan tanah. *Rakyat jangan ditipu dengan penggunaan makelar tanah, yang bisa saja dijabat oleh tokoh masyarakat.*

Kita berharap pemerintah istiqamah dengan rencana dan paradigma pembangunan yang bersifat partisipatif. Janganlah mengulangi kesalahan kedua. Hanya keledai yang terantuk batu dua kali di tempat yang sama

Emotive language

Date : 28 January 2004

“Ambil Langkah Cepat Atasi Flu Burung”

Lonceng kematian bertalu-talu bagi peternak unggas di Jawa Timur. Flu burung benar-benar mewabah. Kerugian ditaksir mencapai Rp 87,5 miliar.

Perkembangan wabah ini sangat cepat. Bahkan pada saat flu ini sudah berjangkit, Menetri Pertanian Bungaran Saragih masih menyanggah.

Jadi, lebih cepat perkembangan wabah daripada informasi penyebaran penyakit ini. Bisa juga menunjukkan betapa lambannya pemerintah dalam menyikapi masalah rakyatnya.

Sebenarnya, kalau hal itu memang menunjukkan kelambanan pemerintah adalah hal yang biasa. Dalam banyak hal pemerintah memang lamban. Misalnya soal tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diusir dari Malaysia. Soal kerusuhan di Poso. Kelangkaan minyak tanah.

Sekaligus menunjukkan kerja pemerintah yang tidak efektif. *Ini tentu bukan akibat reformasi yang membikin pemerintah limbun, tetapi memang kinerja pemerintah yang secara keseluruhan kurang menunjukkan perbaikan.*

False cause

Wabah flu burung ini jelas memiliki dampak yang sangat panjang dengan arah yang bercabang-cabang. Bagi peternak merupakan kerugian yang sangat besar. Apalagi banyak peternak kecil yang bisa gulung tikar.

Hancurnya peternak akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Sektor perunggasan memiliki daya serap tenaga yang cukup besar mulai dari tukang kandang sampai tukang angkut ayam.

Dampak lain, akan banyak industri pakan unggas yang gulung tikar. Industri ini tidak hanya dalam skala besar tetapi juga banyak industri kecil. Lagi-lagi implikasinya akan menambah jumlah pengangguran yang di Indonesia sudah mencapai 45.000 orang.

Flu burung ini akan segera diikuti stop impor unggas dari Indonesia oleh negara lain dari Indonesia. Jepang sudah melakukan. Ini menimbulkan citra negatif yang belum tentu bisa dipulihkan dalam waktu pendek. Dan masih banyak dampak lagi dalam sosial ekonomi.

Melihat dampak yang sangat panjang ini kita sangat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban. Elite negara terlalu sibuk mengurus pemilihan umum. Sibuk bagaimana mempertahankan kedudukan.

Untuk itu, kita berharap pemerintah mengubah sikapnya dengan lebih cekatan menangani flu burung ini.

Misalnya, pemerintah melakukan pemeriksaan intensif ke peternak kecil maupun besar. Kemudian membeli unggas-unggas yang terinfeksi sebelum dijual ke masyarakat. Kemudian unggas yang terinfeksi itu dibakar.

Tentu semua itu atas biaya negara. Sulit diharapkan peternak membakar sendiri. Peternak akan berusaha memperkecil kerugian dengan tetap menjual unggas yang terinfeksi betapapun dengan harga murah.

Pemerintah harus segera mengeluarkan dana dan langkah darurat untuk menyelamatkan perunggasan. Hentikan perdebatan dan pertikaian politik. Atasi masalah riil yang sedang aktual ini.

Date : 29 January 2004

“Mari Kita Dukung Cak Nur Cs”

Unjuk rasa, membuat pernyataan sikap, menggelar renungan bersama dan berbagai aktivitas politik lainnya. Telah terlihat semakin marak menjelang pemilu ini.

Ada mahasiswa, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai kalangan lainnya berdemo, menyatakan sikap atau membuat komisi untuk memerangi hal-hal yang dinilai merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seruan anti politisi busuk, antibangkitnya rezim Orde Baru, anti-KKN dan anti-money politics pun menggema di berbagai pelosok tanah air, termasuk di Graha Fakultas Kedokteran Unair, Surabaya, Selasa (27/1).

Lima tokoh politik dan tokoh agama di luar pemerintahan telah mendeklarasikan Poros Penyelamat Bangsa (PPB). Mereka adalah cendekiawan muslim Nurcholis Madjid (Cak Nur), Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Hidayat nurwahid, Sekjen Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Dr Andi Mallarangeng dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Prof Mahfud MD.

Selain menyuarakan pemberantasan KKN, money politics dan pelanggaran HAM, mereka juga berkomitmen menjaga integritas bangsa, menegakkan hukum, membela wong cilik dan antiintervensi asing.

Terlepas dari siapa dan bagaimana sepak terjang mereka dalam hidup keseharian, niat mereka sebagaimana kerap mereka ungkapkan dalam berbagai kesempatan sangat mulia. Mereka telah menyadari bahwa kondisi mentalitas bangsa ini benar-benar memprihatinkan.

Sebagian politisi sudah tak lagi mengenal budaya malu. Dalam proses pencalegan saja terlihat betapa menyedihkan mentalitas kita. Ada caleg berijazah palsu, memaksakan kehendak, menjegal caleg lain, membeli atau menjual nomor urut dan lain-lain.

Pesta demokrasi nampaknya bakal menjadi pesta duka karena rakyat tak tahu harus memilih apa dan siapa. Tak ada sosok yang benar-benar nyata, lahir-batin. Yang akan mereka pilih adalah badut-badut yang tak lagi lucu.

Kalau para badut terpilih, maka bangsa dan negara akan menjadi “srimulat”. Segala sesuatu yang seharusnya dilakukan secara serius, ternyata mengundang tawa. Atau, yang harus ditertawakan, malah ditangisi, seperti terungkap dalam syair lagu “Started A Joke”.

Hasty generalization

Slippery slope

Emotive language

Slippery slope

Cak Nur Cs telah menyadari semua itu. Karena itu, mereka mencoba menggugah kesadaran kita semua. Bahwa kita semua telah berada di jalan yang salah. Mereka mengajak kita beremung, berkomitmen dalam hati masing-masing supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

Namun demikian, mengajak bangsa beremung tidaklah mudah. Rakyat sepertinya telah jenuh dengan berbagai 'drama' bangsa ini. *Mereka pernah memuja-muja sejumlah tokoh bangsa, karena suara mereka begitu indah dan penuh kebenaran.* Namun, ketika para tokoh pujaan telah berada 'di atas angin', ternyata tiba-tiba wujud mereka berubah menjadi sosok-sosok yang menyedihkan.

Itulah yang terjadi. Fakta-fakta empiris ini kerap membuat kita semua tidak mudah percaya janji-janji dan komitmen. Kenyataan-kenyataan pahit itu telah meyakinkan kita semua, bahwa bangsa dan negara ini tak lagi butuh buaian, melainkan perlu keteladanan.

Emotive language

Date: 30 January 2004

"Jangan Remehkan Flu Burung"

Akhirnya Presiden Megawati memerintahkan pemusnahan unggas yang terinfeksi avian influenza (AI) yang lebih dikenal dengan flu burung.

Sebelumnya, Senin (26/1), Menteri Petanian (Mentan) Bungaran Saragih menyatakan untuk saat ini belum ada rencana pemusnahan besar-besaran meski jutaan ternak di seluruh Indonesia telah terinfeksi wabah tersebut.

Sebaliknya, menurut para pejabat Departemen Pertanian Indonesia, pemerintah akan mengarantina dan mensterilkan peternakan-peternakan dan memulai program vaksinasi besar-besaran.

Keputusan presiden itu berarti selaras dengan desakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang kemarin, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memusnahkan hewan ternak yang terinfeksi avian influenza (AI) atau lebih dikenal dengan flu burung itu.

Badan itu mengatakan vaksinasi atau tindakan lainnya untuk memerangi penyakit itu tidak akan berhasil. Menurut WHO tidak diragukan lagi pemusnahan harus dilakukan untuk mengendalikan wabah itu.

WHO mengatakan pemusnahan 1,5 juta ayam dalam tiga hari di Hongkong pada 1997 berhasil mencegah epidemik itu.

Sepuluh negara Asia telah memastikan dilinda flu burung, setelah Selasa China mengonfirmasi adanya wabah itu di peternakan ayamnya. Sekitar 20 juta ayam telah dimusnahkan atau mati akibat penyakit itu. Kebanyakan negara-negara yang terjangkit virus itu telah melakukan pemusnahan besar-besaran kecuali Indonesia.

Langkah yang diserukan presiden itu baik. Namun pemerintah nampaknya harus memperhatikan yaitu pernyataan bahwa flu burung itu tidak menyerang manusia seperti yang dinyatakan beberapa pejabat baik di pusat maupun daerah.

Pernyataan itu jelas sekali menganggap remeh kenyataan yang ada di berbagai negara di Asia yang sudah menderita korban jiwa akibat serangan flu burung.

Padahal WHO sendiri sudah mengingatkan bahaya penularan dari unggas ke manusia itu. Bahkan WHO mulai mengkhawatirkan dampak lebih jauh dari virus flu burung itu jika bercampur dengan virus flu manusia. *Menurut WHO jika terjadi percampuran, maka bisa-bisa terbentuk apa yang dinamakan dengan virus flu super yang nantinya menjalar dari manusia ke manusia dengan cepat.*

Slippery slope. emotive language

Oleh karena itu kita berharap pemerintah melakukan langkah-langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari serangan flu burung itu.

Tindakan pencegahan bagi para peternak maupun pekerja di sektor perunggasan bukan satu-satunya langkah yang efektif. Kita mengharapkan adanya surveillance yang menyeluruh sehingga mampu mendeteksi bahaya lebih dini. Tanpa penelitian yang memadai kita bisa kecolongan virus flu itu melalui kedatangan wisatawan manca maupun produk impor unggas dari luar negeri. Sekali lagi kita berharap pemerintah tidak meremehkan flu burung. Jika itu terjadi bisa-bisa korban manusia berjatuhan di tanah air.

## SALAM SURYA

# Urbanisasi pasca-Lebaran

TIAP tahun, se usai Lebaran, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya jumlah penduduknya selalu bertambah. Pertambahan ini akibat para pemudik membawa sanak saudaranya yang 'berhasil' merantau ke kota-kota besar.

Padahal merantau di kota besar sebenarnya bukan hal yang mudah. Tanpa tempat tinggal, pekerjaan dan ketrampilan yang memadai, kaum perantau ini akan terlunta. Keberadaan mereka ini jelas akan menambah runyam masalah di kota-kota besar yang selama ini sudah sedemikian dipusingkan dengan berbagai soal.

Namun kedatangan mereka ini bukan tanpa sebab. Kebanyakan mereka datang karena tekanan ekonomi dan ketiadaan lapangan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, merantau menjadi salah satu pilihan di samping menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Dalam menghadapi para urbanis tersebut, Pemkot Surabaya berencana melaksanakan operasi yustisi. Demikian pula Pemerintah DKI. Mereka akan merazia di berbagai terminal, stasiun kereta atau bahkan di setiap permukiman Ibukota. Tindakan ini memang nampaknya efektif, tetapi sebenarnya hanya tindakan parsial dan sporadik yang tidak menyelesaikan masalah.

Penyebab urbanisasi itu ada di hulu, ada di pedesaan, di provinsi tetangga kota-kota besar seperti Banten, Lampung, Jabar, Jateng, DI Jogjakarta dan Jatim. Penyebab kemiskinan pun sudah sejak dahulu juga sudah diketahui, yaitu karena faktor pendidikan, tidak meratanya kesempatan berekonomi, kebijakan sepihak dan ketidakadilan lainnya.

**KARENA** itu sebenarnya tiap daerah perlu menekankan pentingnya memberdayakan warga penduduknya, sesuai dengan asas otonomi daerah. Pemberdayaan itu bukan hanya demi memenuhi harkat otonomi yang mengutamakan mengurus daerah sendiri, namun lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif solusinya.

Inti berotonomi adalah memenuhi harkat kemanusiaan rakyat daerah sendiri dengan memberdayakan rakyat daerah, sehingga tidak membiarkan mereka tetap bergelut dengan kemiskinan.

Dengan demikian, mereka bisa tetap bertahan di kampung halamannya, menjadi benteng ekonomi pedesaan, menjadi penyangga pembangunan di wilayahnya. Mereka juga akan lebih setara dengan warga dan rakyat daerah tetangga, bahkan setara tingkat ekonominya dengan rakyat level perkotaan, yang selama ini menjadi semacam iming-iming bagi mereka.

Yang juga perlu kita pikirkan juga adalah adanya lembaga lintas daerah dan provinsi. Di sini Pemkot Surabaya, misalnya, harus bekerja sama dengan daerah-daerah atau kabupaten tetangga, dalam menangani kemiskinan dan ketidakberdayaan di daerah-daerah. Penanganan itu bertujuan agar setelah berdaya dan mampu ekonominya, rakyat tidak lagi tergiur untuk melanglang buana dan bertualang di kota-kota besar.

Lembaga lintas daerah ini meski nampak terlalu ideal, tapi harus dimulai karena merupakan solusi penyelesaian mendasar urbanisasi.

## SALAM SURYA

# Gejolak di Papua

PAPUA bergejolak kembali menjelang apa yang dinamakan HUT mereka. Memang separatisme masih merupakan salah satu masalah besar yang terus dihadapi Republik ini. Dapat dikatakan bahwa separatisme semacam gerakan yang tiada kunjung padam masa ke masa, selalu saja ada yang berkeinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alasannya yang sebenarnya bermacam-macam. Tetapi yang paling banyak karena kecewa terhadap pemerintah pusat. Kecewa sebab pusat dinilai telah memperlakukan mereka secara tidak adil.

Contohnya daerah yang kaya sumber alam. Kekayaan mereka dikuras, disedot hanya sedikit yang menetes kembali ke daerah asal. Maka, muncullah pemberontakan, keinginan untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI.

Gerakan separatisme juga masih bercokol di Papua. Sekalipun tidak sehebat yang terjadi di Aceh, gerakan separatisme di Papua masih seperti api dalam sekam yang siap berkobar setiap saat.

Tanggal 1 Desember, semua persoalan yang melilit Papua itu menjadi hangat kembali. Sebab, 1 Desember dianggap sebagai hari ulang tahun Papua. Tiap 1 Desember tiba, tiap kali pula sejumlah orang mengibarkan bendera Melanesia. Pengibaran bendera itu secara politis, adalah bukti masih berkeinginan memisahkan diri dari NKRI.

Papua jelas masih terus menyimpan gejolak untuk merdeka. Keadaan ini sebenarnya karena lembeknya sikap pemerintah pusat. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, contohnya, menganggap Bintang Kejora sebagai bendera kultural. Bahkan, Mendagri Hari Sabarno menyatakan perayaan HUT Papua dapat dilakukan di rumah masing-masing asal tidak secara spektakuler.

Separatisme jelas tidak dapat diatasi dengan sikap setengah-setengah seperti itu. Tapi tidak juga diatasi dengan sikap arogan pemerintah pusat, yang menganggap paling benar. Dengan menyadari dua perkara ini, gejolak di Papua mestinya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih bijak.

Tetapi yang juga harus diakui pemerintah akhir-akhir ini juga punya andil besar mendorong terjadinya potensi disintegrasi.

Pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang mendapat perlawanan di daerah, terus dilanjutkan. Kemudian yang juga menimbulkan perlawanan adalah dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

Ini sebenarnya tak perlu karena sebelumnya, sudah ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang meliputi semua wilayah Papua sebagai satu provinsi. Termasuk wilayah yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Irian Jaya Barat. Maka, terjadilah semacam dualisme di tubuh KPU daerah di Papua. Kalau pemerintah tetap saja berbuat seperti itu dan memaksakan kehendak sulit kiranya mengambil hati warga Papua untuk melupakan cita-cita memisahkan diri.

**SALAM SURYA****Penegakan disiplin harus konsisten**

**LIBUR** nasional selalu saja menjadi perkara. Perkara klasik yang muncul adalah kebiasaan bolos kerja para pegawai. Mereka, terutama pegawai negeri sipil (PNS), cenderung molor atau mencuri sehari sebelum libur dan sehari sesudah libur dengan berbagai alasan untuk tidak masuk kantor.

Salah satu alasan yang seolah-olah memperoleh pembenaran bolos adalah libur yang jatuh pada hari 'kejepit'.

Untuk melawan kebiasaan 'hari kejeput' itu, pemerintah memberi tambahan libur tiga hari kepada PNS berkenaan dengan Idul Fitri yang jatuh pada Selasa dan Rabu. Maka, jika ditambah libur Sabtu dan Minggu, total libur Idul Fitri menjadi sembilan hari.

Pemerintah kemudian mengertak akan menindak tegas pegawai negeri yang tidak masuk kantor pada Senin, 1 Desember lalu. Edaran berisi gertakan itu disampaikan jauh sebelum Idul Fitri.

Hasilnya, kebiasaan membolos masih saja terjadi. Libur panjang yang dinikmati selama sembilan hari belum cukup bagi sebagian PNS. Mereka terus saja memperpanjang liburan.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin, meninjau sejumlah kantor pemerintah kemarin pagi. Yang dijumpai adalah masih ada saja pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas.

**HARI** pertama kerja setelah libur panjang membuktikan bahwa disiplin kerja pegawai negeri sipil kita masih jelek. Disiplin yang longgar ini dipermudah oleh disiplin yang lembek dari atasan.

Meski Menteri PAN Feisal Tamin menyodorkan angka-angka statistik bahwa jumlah pegawai negeri yang bolos setiap usai libur Idul Fitri menurun dari tahun ke tahun, tapi tak dapat dipungkiri disiplin PNS rendah.

Kita sebenarnya layak bergembira karena jumlah PNS yang mangkir setiap usai libur Idul Fitri menurun drastis dari tahun ke tahun. Akan tetapi, itu belum memberikan gambaran apa-apa tentang produktivitas, loyalitas, dan dedikasi terhadap pelayanan publik.

Karena itu sanksi tegas harus diberlakukan. Kampanye tentang disiplin harus semakin hari semakin digalakkan. Para pejabat tinggi harus menjadi pelopor-pelopor disiplin. Tanpa itu, disiplin tidak lebih dari retorika.

Dan bukan hanya soal libur nasional itu saja yang sebenarnya yang harus dibenahi. Disiplin tiap harilah yang sebenarnya terus harus dipelihara, karena melalui disiplin yang terus-menerus itulah akan membentuk perilaku yang otomatis dari para pelakunya.

Ketika negara masih menjadi sumber dinamika ekonomi seperti Indonesia, kedisiplinan PNS sangat menentukan kemajuan bangsa ini. PNS yang korup dan malas akan menularkan korupsi dan kemalasan.

Kecenderungan meningkatnya disiplin saat libur nasional ini harus terus dipupuk. Tetapi sekali lagi yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dan keberanian untuk terus-menerus memperbaiki yang salah. Disiplin yang lembek tidak boleh dipelihara.

**SALAM SURYA****Komisi Pemberantasan Korupsi**

**ADA** masalah penting yang terabaikan beberapa hari ini, yaitu proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Seleksi kali ini nampaknya kurang diminati publik.

Sikap apatis itu bisa kita lihat menyangkut proses seleksi itu. Respons masyarakat tentang masalah itu sangat minim. Yang muncul hanya berupa dukungan untuk calon-calon tertentu; sebenarnya hal itu tidak bisa dianggap sebagai respons yang obyektif.

Sebab, bukan respons yang demikian yang diharapkan, tapi lebih kepada tanggapan yang bisa memberikan gambaran menyeluruh dari 40 capim KPTPK. Dari soal kejujuran hingga kemampuan intelektual sebagaimana diatur dengan baik dalam UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika rakyat apatis, maka kita benar-benar dalam keadaan bahaya. Bagaimana nasib bangsa ini kalau rakyat sudah tidak peduli lagi terhadap pemberantasan korupsi?

Namun hal ini perlu disadari karena rakyat sudah lama kecewa terhadap penegakan hukum di negeri ini yang sudah berusia 58 tahun, dan kekecewaan itu akan memuncak. Begitu banyak jargon mengenai arti penting pemberantasan korupsi, sementara kita juga menyaksikan lembeknya penegakan hukum.

**DALAM** kaitan minimnya respons masyarakat dan enggannya sejumlah lembaga pemerintah memberikan informasi mengenai kualitas 40 capim KPTPK, kita mengingatkan agar panitia seleksi bekerja ekstra keras.

Mencari dan menggali keterangan tentang para Capim KPTPK dan memilih calon terbaik. Tidak berlebihan jika kita ingatkan pula semua calon presiden (capres) untuk mewaspadai gejala apatisisme publik itu. Di tengah upaya mereka menjangkau dukungan, ketulusan capres mendatang untuk memberantas korupsi, harus ditonjolkan. Untuk menyeleksi calon-calon itu perlu cukup waktu, tidak usah tergesa karena sulit menemukan calon yang kredibel.

Sebenarnya masalah pemberantasan korupsi ini saat ini mendapatkan angin dengan dukungan dari berbagai pihak mulai dari para pengusaha dan bahkan NU dan Muhammadiyah bergandeng tangan melawan korupsi.

Namun dukungan ini akan sia-sia jika nanti yang terpilih bukan orang yang memiliki integritas dan berani melawan korupsi.

Melawan korupsi memang tidak mudah. Selain pelakunya pandai menyasiasi hukum, iming-iming yang ditawarkan mereka sungguh menggoda. Karenanya *track record* menjadi masalah penting bagi pemimpin KPTPK mendatang. Kali ini kita butuh orang yang benar-benar bersih agar dalam melaksanakan tugas tidak *ewuh pakewuh*.

## SALAM SURYA

# Benang kusut pembunuhan KH Asmuni

**KASUS** pembunuhan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatiroto KH Asmuni Ishak menjadi benang kusut. Ruwet.

Hal ini terjadi karena telanjur masuk ke ranah politik. Sehingga penanganan secara kriminal murni menjadi lebih sulit karena hipotesis-hipotesis yang dikembangkan polisi akan berbenturan dengan asumsi-asumsi politis di masyarakat.

Di samping itu, hasilnya belum tentu mendapat legitimasi masyarakat. Karena masyarakat telanjur memiliki kerangka bahwa pembunuhan ini berlatar belakang politik. Ditambah ada kecurigaan keterlibatan *state* (negara). Padahal polisi merupakan institusi *state*.

Pengakuan Ketua DPC PKB Jatiroto Husein Cholil bahwa dirinya diintimidasi dan dipaksa mengakui sebagai pelaku pembunuhan KH Asmuni oleh aparat penyidik, jelas memperuwet persoalan. Mau tidak mau dapat memperbesar kecurigaan masyarakat bahwa *state* terlibat.

Kecurigaan masyarakat itu juga dilatarbelakangi kasus Teror Ninja I tahun 1999 di mana ada kecurigaan ke *state*. Sampai-sampai Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik harus istirahat di tengah jalan karena dicurigai sebagai aparat *state* yang terlibat.

MENJADI lebih ruwet lagi karena terjadi perbedaan persepsi di masyarakat. Misalnya antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nahdlatul Ulama (NU), dua institusi yang sama-sama mempunyai KH Asmuni Ishak. Di samping pengurus PKB, KH Asmuni adalah tokoh NU. Ia pernah menjabat sebagai Ketua NU Jatiroto.

PKB melalui Gus Dur terus terang tidak percaya terhadap penyidikan yang dilakukan polisi. Sementara Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi meminta masyarakat mempercayai polisi.

Mencuatnya polemik Gus Dur-Hasyim Muzadi ini memunculkan persoalan baru yang ruwet pula. Masalah pembunuhan KH Asmuni bahkan tergeser oleh isu perpecahan Gus Dur - Hasyim. Perbedaan keduanya dianggap dalam konteks rivalitas menuju kursi kepresidenan kedua tokoh tersebut.

MASALAHNYA sekarang adalah bagaimana persoalan pembunuhan itu segera dapat dibuka secara gamblang. Apakah ada unsur politis atau semata-mata kriminal murni.

Untuk itulah kita mengharapkan polisi melakukan pengusutan secara transparan. Tidak salah pula kalau polisi melibatkan masyarakat.

Misalnya, menyertakan wakil NU dan PKB. Hal demikian bukan berarti membiarkan insitusi polisi diinjak-injak, melainkan untuk mengefektifkan penyelidikan dalam arti agar mendapat legitimasi masyarakat.

Penyertaan masyarakat itu sebenarnya juga bernilai pengawasan terhadap lembaga kepolisian. Kita melihat, pengawasan ke lembaga kepolisian sangat lemah sejak polisi terpisah dari militer.

Kalangan politisi agar mengurangi intervensinya ke lembaga kepolisian. Pernyataan-pernyataan politik yang sebenarnya bernuansa mengganggu kasus pembunuhan itu untuk kepentingan 'kampanye', haruslah dihentikan. Sebab, hanya mempersulit penyelidikan secara tuntas.

## SALAM SURYA

# Tindak tegas pembobol bank

SETELAH terjadinya pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun kini giliran BRI bobol sebesar Rp 294 miliar. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap bank-bank sangat lemah.

Kini kejaksan terus menyidik kasus bobolnya BRI (Bank Rakyat Indonesia) senilai Rp 294 miliar. Tiga tersangka kini ditahan.

Tiga tersangka yang ditahan adalah Kepala Cabang BRI Senen Ir Deden Gumilar yang ditahan sejak 3 November 2003 lalu, Kepala Cabang Pembantu BRI Tanah Abang Agus Riyanto yang ditahan sejak 20 November 2003, dan Kepala Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor yang ditahan sejak 13 November. Ketiganya kini ditahan di Rutan Salemba.

Dari keterangan Humas Kejaksaan Agung terungkap bahwa mereka menyidik kasus dugaan korupsi di BRI ini bukan atas laporan dari direksi BRI. Kasus tersebut adalah murni temuan dari Kejaksaan berdasarkan laporan masyarakat.

Bahkan, menurut Humas Kejaksaan Kakanwil BRI DKI Jakarta terkesan menutup-nutupi kasus ini saat dilakukan penyidikan.

Kasus ini bermula ketika terjadi transaksi deposito *on call* dari BPD Kaltim ke BRI Senen senilai Rp 100 miliar lebih. Namun, pada hari yang sama, ada faksimili dari BPD Kaltim kepada BRI Cabang Senen agar memindahkan deposito tersebut ke rekening PT Delta Makmur Eksperindo (DME). PT DME ini dipimpin oleh Direktur Utama Hartono dan komisarisnya Yudi Kartolo.

Lalu kemudian, BRI Cabang Senen mentransfer rekening tersebut hanya berdasarkan faksimili dari BPD Kaltim.

SEKALI lagi ini membuktikan lemahnya manajemen perbankan di Indonesia, tanpa cek dan ricek serta tanpa verifikasi, uang langsung ditransfer ke PT DME.

Begitu juga dengan adanya penjaminan deposito terhadap BRI Cabang Pembantu Tanah Abang, di mana uang juga ditransfer tanpa verifikasi. Padahal, permintaan pemindahan itu adalah fiktif alias palsu.

Berulangnya kasus pembobolan bank-bank pelat merah semakin jelas disebabkan lemahnya sikap pimpinan dan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah dan pimpinan bank harus bersikap keras terhadap para penjahat perbankan.

Membaiknya situasi ekonomi nasional yang tercermin dari stabilitas finansial ternyata masih sangat rapuh karena tidak diimbangi dengan perubahan budaya dan perilaku, terutama dari sistem perbankan nasional.

Sebenarnya *system operating procedure* yang dibuat kalangan perbankan sudah sangat bagus. Pasalnya, penyusunannya sudah melibatkan konsultan internasional.

Tapi manual yang bagus dan disusun dengan biaya mahal tidak akan ada artinya kalau sikap pimpinan lembek terhadap diri sendiri atau lingkungannya lemah.

Masalah ini juga tak terlepas dari lemahnya pengawasan BUMN. Ada kesan bahwa proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMN sering tidak transparan di Kantor Meneg BUMN. Akibatnya pengawasan tidak maksimal karena orang yang diberi tugas tak kredibel.

## SALAM SURYA

# Manuver politik Tutut

SITI Hardiyanti Rukmana (Tutut)—putri pertama mantan presiden Soeharto, sebagai calon presiden dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengundang reaksi beragam. Reaksi terutama mengaitkan Tutut untuk Pemilu 2004 dengan bangkitnya Orde Baru dalam kancah politik Indonesia.

Ada yang menilai, kekuatan Orba yang telah ditolak pada gerakan massa menuntut reformasi, Mei 1998, akan bangkit kembali. Komentar lain menyebutkan, tampilnya Tutut, meskipun secara eksplisit belum memberikan jawaban atas tawaran pencalonannya oleh PKPB, sebagai semacam uji coba saja bagi kekuatan Orba untuk kembali berkuasa.

Ada juga yang mengabaikannya karena menilai Tutut tidak didukung partai besar. PKPB sendiri masih harus membuktikan dirinya mampu merebut suara rakyat pada pemilihan parlemen 2004.

MUNCULNYA Tutut bisa saja merupakan bagian dari upaya bangkitnya Orba, apalagi Ketua Umum PKPB, R Hartono, menyebutkan bahwa ada rakyat yang merindukan kembalinya zaman Soeharto. Namun tampilnya Tutut belum berarti Soeharto akan bisa tampil lagi. Namun kembalinya kekuatan dari rezim yang pernah ditolak merupakan cerminan bahwa rezim yang sekarang nampaknya gagal menjawab tuntutan rakyat tentang reformasi kehidupan bangsa dan bernegara.

Keberanian tokoh Orba tampil kembali, bukan hanya karena mereka masih mengantongi banyak dana, tapi juga karena tokoh-tokoh pemerintahan sekarang tidak menunjukkan perbedaan dengan rezim Orba, dan juga tidak mencerminkan dirinya sebagai tokoh reformis.

Era reformasi ternyata tidak mengubah perilaku KKN yang subur saat Orde Baru. Politik yang elitis dan penuh permainan uang bahkan ditampilkan semakin vulgar.

Kegagalan era reformasi yang sangat dirasakan adalah pengangguran yang terus bertambah, beban hidup yang makin berat, sementara pemulihan ekonomi sangat lambat.

Rakyat menyaksikan bagaimana pejabat hidup dalam kemewahan, menjadi kaya dalam waktu singkat, dan korupsi tak bisa diberantas, kalau bukan makin subur.

Pembobolan bank yang diduga melibatkan politisi, dan penjualan aset negara di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) secara murah meriah merupakan tontonan yang menyakitkan bagi rakyat yang menghendaki reformasi. Jadi dalam praktik berbangsa dan bernegara, tidak ada bedanya pemerintahan sekarang dengan rezim Orde Baru dalam hal KKN.

Kelebihan lain dari tokoh Orde Baru, mereka tampil dalam kancah politik nasional, dengan bahasa seolah seorang reformis. Ini dimungkinkan karena mereka memang melihat masa sekarang ini sama dengan masa lalu.

Situasi dan praktik politik sekarang tak beda dengan masa lalu, atau bahkan lebih parah, sehingga permainannya sudah sangat mereka kenal.

Satu-satunya jalan mencegah reformasi *mandeg* sebenarnya mudah. Kembali pada cita-cita reformasi, perbaiki moral dan gandeng seluruh potensi bangsa, maka reformasi akan bisa kita teruskan.

## SALAM SURYA

# Masyarakat harus selektif isu teror Madura

MANTAN menteri pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Mahfud MD mengemukakan, adanya data operasi teror dan pembunuhan dengan bayaran murah terhadap ulama di Madura.

Data yang menurut Mahfud cukup lengkap ini telah disampaikan ke Polda Jawa Timur, Oktober lalu. Tetapi tidak ada tanggapan. Untuk itulah ia berencana menyampaikan laporan tersebut kepada Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar.

Ia meminta agar data tersebut diperhatikan secara serius oleh kepolisian. Untuk mencegah berulangnya kasus teror dan pembunuhan ulama di sejumlah daerah Jawa Timur tahun 1998-1999.

PENGUNGKAPAN data oleh Mahfud ini mengagetkan kita. Sebelumnya kita dikagetkan dengan pembunuhan Ketua DPC PKB Jatiroto KH Asmuni Ishak, yang hingga sekarang belum jelas perkaranya.

Walau tidak serta merta ada kaitan dengan pembunuhan tersebut, tetapi data yang diungkap Mahfud ini seolah memperkuat dugaan bahwa pembunuhan KH Asmuni Ishak ini bernuansa politik.

Di samping itu, proses menuju Pemilu 2004 ini seolah dalam bingkai kriminalisasi politik. Dan sasaran yang jadi korban adalah kiai, ulama, dan guru ngaji. Yang dikesankan sebagai basisnya PKB. Sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa sasaran teror ini adalah PKB.

Sekali lagi ini hanya kesan. Dan kesan ini lahir dari informasi yang carut-marut. Yang bisa saja kepentingan politik memasuki ranah kriminal.

Kepentingan politik apa? Bisa untuk teror dengan tujuan menyebarkan ketakutan rakyat agar tidak berpartisipasi pada pemilu. Teror untuk menggembosi partai tertentu.

Tetapi juga bisa politisasi kriminalitas justru untuk menaikkan pamor politik partai. Untuk mempercepat proses konsolidasi dalam tubuh partai itu sendiri. Dengan menciptakan isu lawan bersama, maka akan diperoleh konsolidasi.

UNTUK itu kita berharap Mahfud MD tidak hanya melontarkan letupan sepotong-potong. Data yang sumir jangan keburu dilontarkan ke masyarakat. Sebab dari cara pengungkapan Mahfud, sangat terkesan data yang dilontarkan masih sumir.

Pengungkapan data yang sepotong dan masih sumir, punya potensi membingungkan masyarakat. Apalagi menyangkut tokoh masyarakat seperti kiai, maka hal demikian sangat sensitif.

Lihat saja di daerah-daerah sekarang, rumah kiai dan pondok pesantren mulai dijaga. Bagaimana dengan kiai kecil, guru ngaji yang tidak dijaga, apakah tidak menimbulkan ketakutan.

Polisi kita harapkan lebih proaktif terhadap data yang dilontarkan Mahfud MD. Polisi memiliki kemampuan menyeleksi data itu memiliki bobot atau hanya sensasi murahan.

Kalau memang data yang dilontarkan Mahfud memiliki bobot kebenaran, maka polisi harus mengakui dan menindaklanjuti. Tidak perlu malu keduluan masyarakat. Bukankah masyarakat memang mitra polisi.

Sebaliknya, kalau data yang dilontarkan Mahfud tidak memiliki bobot kebenaran yang signifikan, polisi harus berani menyampaikan ke masyarakat. Biar masyarakat yang menilai, isu teror di Madura itu sekadar promosi dan kampanye terselubung ataukah memang memiliki kebenaran.

## SALAM SURYA

# Rakyat rindu perubahan, bukan rezim Soeharto

MUNCULNYA Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut sebagai calon presiden memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu spekulasi menarik adalah, munculnya Mbak Tutut sebagai indikasi bahwa rakyat merindukan kembali tampilnya rezim Soeharto. *Polling Asia Foundation* tentang demokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa 53 persen responden menginginkan pemerintahan yang kuat, sejenis rezim otoriter Orde Baru, setidaknya juga meneguhkan spekulasi tersebut. Apalagi para responden yang dijangar *Asia Foundation* berasal dari kalangan akademis yang notabene paham betul tentang demokrasi.

Tetapi benarkah rakyat merindukan kembalinya rezim Soeharto seperti diungkap R Hartono dalam sebuah wawancara dengan sebuah tv swasta? Jawabannya mungkin tidak. Kalaupun rakyat terkesan sudah enggan dengan pemerintahan yang sekarang, hal itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, rakyat menginginkan pemerintahan yang bisa mengambil keputusan yang di dalam bayangan mereka lebih kuat. Sebab, rakyat sudah jengah dengan pemerintah yang lemah. Kedua keinginan itu merupakan kritik terhadap pemerintahan yang sekarang dan bukan penolakan atas sistem demokrasi. Dan tentu saja keinginan tersebut juga tidak bisa serta merta dibaca sebagai keinginan untuk kembali pada sistem yang kurang demokratis alias otoriter seperti rezim Soeharto.

FENOMENA munculnya Mbak Tutut bisa juga dibaca sebagai ketidakpuasan terhadap pemerintah Megawati Soekarnoputri. Maka, kalau Tutut Soeharto cerdas, bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendulang sukses sebagai calon presiden Pemilu 2004. Jika melihat pengalaman selama era reformasi —lima tahun tiga presiden— ke depan rasanya memang diperlukan rezim yang kuat. Sebab kalau tidak kuat tidak bisa berbuat apa-apa. Rezim kuat tidak otomatis otoriter, tetapi penegakan sistem hukum yang tegas, konsisten, dan jelas. Dalam persepsi masyarakat Indonesia, rezim kuat itu artinya rezim yang mempunyai partai yang dapat dukungan pemilu mayoritas mutlak.

KALAU kita memilah calon pemilih Pemilu 2004 menjadi lapisan menengah ke atas dan lapisan menengah ke bawah, seolah memang ada dua kepentingan yang paradoks. Lapisan menengah ke atas rupanya lebih gandrung dengan demokrasi. Mereka kecewa terhadap pemerintahan sekarang lebih karena ada ciri-ciri Orde Baru yang dipraktikkan oleh pemerintah sekarang masih sangat kental. Tetapi bagi masyarakat lapisan bawah, persoalan mereka ya ekonomi, bukan demokrasi. Pekerjaan, upah, gaji, penghasilan adalah masalah pokok mereka.

Nah mereka inilah yang terus terang mengatakan, bahwa Orde Baru itu lebih baik. Mereka bukan rindu rezim Soeharto, melainkan kepada keadaan ekonomi di mana mereka bisa hidup lebih baik. Apakah figur tokohnya nanti Tutut Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais atau siapa, bagi lapisan menengah ke bawah tidak penting. Kalau Mbak Tutut mampu mengubah citra kekuasaan yang akan dibangun, bukan memfotokopi ayahnya, tapi membangun yang baru sesuai dengan keadaan sekarang, apa salahnya. Intinya masyarakat menuntut kecerdasan dari Tutut Soeharto atau siapa pun. Tapi kalau tidak menjanjikan perubahan apa-apa, pasti ditolak.

## SALAM SURYA

# Pemkot pelanggar HAM terbesar

SURVEI Rakyat Miskin Kota menemukan data bahwa pemerintah kota atau pemerintah kabupaten merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar. Meliputi 70 persen dari seluruh kasus pelanggaran HAM.

Baru kemudian disusul institusi lain seperti perusahaan daerah pasar, polisi, dinas perhubungan, perusahaan swasta, pemerintah provinsi, majikan rumah tangga.

Lantaran pelanggaran terbesar oleh pemkot atau pemkab, sangat wajar kalau kemudian yang menjadi korban mayoritas adalah pedagang kaki lima (PKL). Disusul warga stren kali, pedagang pasar, juru parkir, penghuni rumah susun, anak jalanan, sopir, warga kota, pembantu rumah tangga.

DATA hasil survei di atas menunjukkan, kecenderungan pemkot dan pemkab kembali kepada pola Orde Baru. Yaitu adanya kejahatan dan kekerasan *state* (negara) terhadap *society* (masyarakat).

Pada awal-awal zaman reformasi, kekerasan dan kejahatan *state* berkurang karena negara dalam keadaan tidak berdaya. Saat itu terjadi arus balik serangan dan 'balas dendam' masyarakat terhadap negara yang merepresinya selama Orde Baru.

Sekarang negara seperti hendak balas dendam atas posisinya yang tidak berdaya, *dikuya-kuya* semasa awal-awal reformasi. Dan yang menjadi sasaran bukannya kelompok masyarakat yang dulu mengkritik negara, melainkan kelompok masyarakat yang lemah.

Maka terlihatlah PKL, warga setren kali, juru parkir, pedagang pasar yang menjadi korban. Mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan. Yang tidak memiliki keberdayaan politis maupun hukum.

Kita sering sekali menyaksikan bagaimana PKL yang karena terpaksa harus jualan di trotoar, digaruk, diganyang, diharu-biru sampai lunglai tak berdaya.

Pemkot atau pemkab tahunya mereka itu melanggar aturan kota. Padahal aturan itu dibuat tanpa mengindahkan nasib warganya. Hanya semata-mata kepentingan elite dan gengsi pemerintah.

Pemkot atau pemkab seperti tidak mau membuka mata bahwa PKL, pedagang pasar adalah katup pengaman perekonomian rakyat. Apalagi di saat perekonomian nasional terpuruk seperti saat ini.

UNTUK itulah, kita mengharapkan pemkot atau pemkab melakukan gerakan mawas diri apakah sudah berfungsi sebagai pengembalian amanat penderitaan rakyat (ampora).

Haruslah ingat, pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat. Mengangkat dan memperbaiki nasibnya. Bukan mengganyang, mengharu-biru. Kebahagiaan negara adalah bila melihat rakyatnya hidup damai sejahtera. HAM-nya terjamin.

Haruslah sadar bahwa dengan indikasi sebagai pelanggar HAM terbesar, maka pemerintah itu telah menjadi zalim. Berbuat aniaya. Kalau sudah begitu, jangan harapkan ada kepercayaan dari masyarakat. Jangan mimpi terjalin cinta kasih rakyat terhadap pemerintahnya. Jangan berharap Tuhan akan memberikan berkah kepada pemerintahan yang demikian.

## SALAM SURYA

# SEA Games 22

SEA Games XXII di Vietnam berakhir sudah. Hasilnya kita juga tahu bahwa kontingen RI hanya mampu meraih 55 emas dan berada di urutan tiga setelah Vietnam dan Thailand. Prestasi ini mengulang prestasi SEA Games XXI Kuala Lumpur.

Memang sejak masa krisis tahun 1997 prestasi Indonesia terus terpuruk. Tahun 1999, pada SEA Games XX di Brunei Darussalam, Indonesia tergeser dari yang selalu juara umum ke urutan kedua. Pada SEA Games berikutnya di Kuala Lumpur tahun 2001 kontingen Indonesia bahkan digusur dari tempat kedua ke urutan ketiga. Lalu pada SEA Games XXII di Vietnam lagi-lagi kita tidak mampu beranjak dari posisi tiga besar.

Pada posisi itu, tokoh olahraga nasional dan sejumlah pengurus Induk Organisasi Olahraga mengatakan, berada di urutan ketiga sudah merupakan sebuah prestasi karena kontingen "Merah Putih" mengalami kendala dalam persiapan.

Selain itu, 70 persen atlet yang dikirim, merupakan atlet lapis kedua sehingga secara otomatis visi pengiriman atlet ke SEA Games sekarang pun berubah. Tidak lagi dengan tuntutan harus juara umum karena arena SEA Games hanyalah kawah candradimuka bagi pembinaan prestasi menuju Asian Games dan Olimpiade.

**KITA** mengalami keterpurukan di bidang olahraga karena kita tidak lagi memperhatikan proses pembinaan pada lapis bawah (tingkat kadet, remaja, dan junior). Sebab, ketika pucuk pimpinan induk-induk organisasi semasa Orde Baru (32 tahun) dipegang oleh militer dan pejabat tinggi negara, mereka hanya membina atlet yang sudah jadi, tanpa memperhatikan pembibitan di seluruh pelosok tanah air.

Karena itu jawaban untuk memajukan prestasi olahraga adalah mencari dan membina sebanyak mungkin atlet-atlet muda.

Karena itu perlu kiranya dibuat UU olahraga yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah dalam membina olahraga. Salah satu butir yang berpotensi dalam pembinaan olahraga adalah pemerintah diwajibkan mendirikan fasilitas olahraga hingga pada tingkat kecamatan. Itu artinya pemerintah menjadi fasilitator dalam pembinaan sehingga dengan UU olahraga pembinaan berjenjang sudah bisa dipastikan berjalan semestinya.

Kita tidak boleh terjebak pada pernyataan yang menyebutkan hasil SEA Games sebagai yang terburuk karena tidak juara umum. Hasil SEA Games dengan tetap di urutan ketiga dan meraih sekitar 55 medali emas sudah maksimal sebagai hasil atlet-atlet lapis kedua Indonesia dan debutan seperti atlet panahan Rina Dewi asal Bojonegoro yang baru sekali ini ikut SEA Games dan telah menyumbangkan medali emas.

Namun tentu kita tak boleh berpuas diri mengingat negara-negara ASEAN nampak kemajuannya dengan menggandeng iptek untuk kemajuan olahraga. Untuk hal yang satu ini kita nampaknya harus terus belajar.

## SALAM SURYA

# Tertangkapnya Saddam, modal baru Bush

MANTAN Presiden Irak Saddam Hussein dipastikan ditangkap 14 Desember di wilayah Tikrit, tempat kelahirannya. Ia ditangkap dalam suatu operasi ofensif dengan kekuatan 600 tentara AS.

Saddam tidak membuatkan janjinya untuk memberikan perlawanan sampai titik darah terakhir kepada Amerika. Ia menyerah dengan mudah.

Mantan tiran Irak itu ditangkap dalam kondisi sangat kelelahan. Badannya kurus. Ia hanya ditemani dua orang kawannya.

Penangkapan Saddam ini disambut dalam tiga versi. Versi pertama, sebagian menyambut dengan sukacita. Mereka menembakkan senjata ke udara. Bernyanyi dan menari. Mereka adalah orang-orang yang merasa dizalimi Saddam selama berkuasa.

Yang gembira pula adalah para 'boneka' Amerika di Irak yang menghambakan diri kepada Amerika. Dengan tertangkapnya Saddam, peluang mereka untuk segera membangun kekuasaan di Irak akan lebih cepat karena selama ini Saddam menjadi simbol perlawanan terhadap rezim baru boneka AS.

ADAPUN versi yang berduka cita adalah rakyat Irak yang merasa Saddam adalah pahlawannya. Berkat tangan Saddam, Irak menjadi negara terbesar di lingkungan Arab. Saddam membawa Irak dalam kemakmuran.

Saddam memang keras. Sering kali mengabaikan hak asasi manusia saat berkuasa. Memerintah dengan tangan besi. Tidak toleran terhadap kritik.

Hal demikian memang tidak cocok dalam konsep Barat. Tetapi mengacu pemikiran politik ahli-ahli Arab klasik, Saddam melakukan hal yang tepat karena bangsa Arab itu sulit dipersatukan. Terlalu banyak bicara sedikit kerja. Maka dibutuhkan pemerintahan yang kuat, keras.

Dengan demikian, dalam konsep pemikiran Arab klasik, metode pemerintahan yang dipakai Saddam tidaklah sepenuhnya salah. Akan dinilai salah kalau yang digunakan ukuran Barat.

YANG jelas mendapat keuntungan dari tertangkapnya Saddam adalah Presiden AS George W Bush. Ia mendapat modal baru dan segar untuk maju ke pemilihan presiden tahun depan.

Bush sebenarnya sudah terpuruk dalam bursa presiden. Invasi yang dilanjutkan dengan menjajah Irak, memerosotkan popularitasnya. Apalagi dalihnya invasi bahwa Irak memiliki senjata pembunuh massal sama sekali tidak terbukti.

Ditambah kegagalan menangkap Saddam. Bush benar-benar seperti bebek lumpuh, setelah gagal menangkap Osama bin Laden maupun penguasa Afghanistan Mullah Omar.

Kemungkinan besar Bush akan memerintahkan agar Saddam diadili di AS seperti Presiden Panama Noriega. Akan memerintahkan Saddam dijebloskan ke penjara Guantamao yang angker.

Bush pasti khawatir kalau Saddam diadili dalam pengadilan terbuka di Baghdad, hanya akan mempermalukan AS. Saddam pasti akan membuka betapa culasnya AS. Irak menghamba ke AS, tetapi begitu ada kepentingan sendiri bersama Israel, AS menghancurkan hambanya sendiri.

Dengan tertangkapnya Saddam, belum tentu perlawanan rakyat Irak terhadap AS mengendor. Sebab AS telanjur dicap sebagai penjajah. Dan kenyataannya memang begitu. Kenyataan pula, dijajah AS tambah sengsara. Di Irak akan segera muncul Saddam-Saddam baru yang memberikan perlawanan tanpa akhir. Seperti semboyan kita pula: Patah satu tumbuh seribu.

## SALAM SURYA

## Utang baru CGI

PEKAN lalu 30 negara dan lembaga-lembaga multilateral yang tergabung dalam CGI (*Consultative Group on Indonesia*) memutuskan memberikan pinjaman baru bagi Indonesia.

Pinjaman baru itu berjumlah US\$ 3,4 miliar, lebih besar dibanding tahun 2002 yang hanya US\$ 3,14 miliar. Dari jumlah itu sebanyak US\$ 2,8 miliar akan digunakan untuk menutup defisit anggaran (APBN) 2004, yaitu US\$1 miliar dolar untuk pembiayaan program dan US\$ 1,8 miliar dolar untuk bantuan proyek dan hibah kepada daerah dan LSM.

Pertanyaan yang mendasar tentu mengapa utang kita terus bertumbuh, sementara belum optimal menggunakan utang luar negeri secara tepat (tidak boros, tidak diselewengkan dan tepat arah), dan juga belum optimal pengelolaan sumber pendapatan dalam negeri (pajak dan devisa ekspor).

Seluruh utang kita kini berjumlah Rp 1.260 triliun: utang luar negeri sebesar Rp 672,3 triliun (US\$ 70 miliar dolar) dan utang dalam negeri sebesar Rp 588,6 triliun.

Tidak begitu jelas mengapa utang kita naik pada 2003 ini. Namun menurut beberapa pengamat pemerintah berjaga-jaga terhadap kerawanan situasi, seperti kredit bermasalah (*nonperforming loan*) akan meningkat, karena banyak orang politik (partai) meminjam uang ke bank, yang berpeluang menyebabkan kredit macet. Tapi negara-negara kreditor juga berkeinginan untuk menjaga kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi mereka di Indonesia. Maka utang kita tetap besar.

Meminta utang lebih mudah daripada kewajiban mengembalikan utang, apalagi utang itu mengatasnamakan rakyat. Kita terus menghadapi dilema ini, sementara negara-negara penerima utang IMF belasan dan puluhan miliar dolar seperti Korea Selatan dan Thailand, sudah berhasil membayar utang-utangnya dan menghentikan utang-utang itu karena efisien menggunakannya.

Masalah penggunaan inilah berkaitan dengan Pemilu 2004 kita juga perlu menyimak pendapat bahwa partai-partai dan tokoh politik akan 'merubungi perbankan nasional' untuk memperoleh dana kampanye bagi penyuksesan kandidat-kandidat legislatif dan eksekutif mereka termasuk menyiapkan para kandidat presiden.

Uang untuk politik dalam arti positif memang tak bisa dihindari di negara mana pun. Namun soalnya apakah legitimasi untuk memperoleh dana itu terjamin dan tidak melanggar hukum.

Fenomena buruk itu jangan sampai muncul, karena itu faktor pengawasan harus menjadi prioritas. Tidak boleh lagi ada bank bobol karena ini juga cerminan dari situasi semacam itu.

Maka seperti dikatakan Menteri Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, ratusan triliun rupiah menguap dibawa oleh para koruptor. Kalau demikian, kita hanya menimbun utang untuk membayar utang. Tidak ada manfaat sama sekali bagi rakyat.

## SALAM SURYA

## Tugas baru manajemen BNI

SETELAH ramai dengan masalah pembobolan, Bank BNI berbenah dengan memilih anggota dewan komisaris dan direksi PT Bank BNI. Dari anggota yang terpilih dan beragam mengisyaratkan tekad untuk mengembalikan institusi ini kepada jalurnya. Namanya kehadiran orang-orang luar akan memudahkan pembenahan dalam bank tersebut.

Problem yang harus ditangani pada bank yang punya hubungan dengan kemerdekaan bangsa ini sudah diketahui yakni, perbaikan pengawasan internal. Masalah ini menyangkut perbaikan peraturan dan mentalitas manusianya.

Bank bobol terjadi karena situasi yang memungkinkan serta tersedianya peluang. Pengawasan sangat lemah karena sikap tegas bukan kepribadian utama dari bangsa ini. Yang lebih sering mengemuka adalah sikap permisif atau berdamai terhadap kesulitan dan kesalahan.

Kalau mau diurut, jumlah penyelewengan di sektor perbankan memang jauh lebih besar ketimbang dana yang digunakan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) untuk membuat pesawat terbang. Hanya bedanya, penggunaan dana IPTN dikaitkan dengan isu politik.

Perkembangan ekonomi sejak 1970-an tidak lepas dari peran perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Peran perbankan makin menonjol setelah pemerintah menerbitkan kebijaksanaan yang mengizinkan pendirian bank baru dengan modal setor yang sangat minim Rp 10 miliar. Tujuannya cukup ideal yakni membuat masyarakat menjadi *bank minded* dan menggiatkan perekonomian.

Tetapi sisi pengawasan yang dilakukan otoritas moneter sangat lemah sebab penambahan jumlah bank baru tidak diimbangi dengan peningkatan tenaga pengawas dan peraturan yang memadai.

Sementara unit pengawas yang diharapkan tidak tersentuh, malah turut senang bermain bayang-bayang. Beberapa bank yang sahamnya juga dimiliki Bank Indonesia malah turut keceles.

Karena itu Dewan Direksi dan Komisaris PT Bank BNI Tbk bagaimanapun harus melakukan terobosan efektif dan bijak agar BNI menjadi lebih sehat. Dalam konteks ini, pembenahan tentu tidak bisa bersifat merata karena tak semua divisi atau karyawan BNI membawa bakat penyelewengan.

Pembenahan ke dalam, seperti merupakan sebuah sasaran antara guna menciptakan Bank BNI yang mampu menjalankan fungsi-fungsi perbankan dengan semestinya. Misalnya, fungsi intermediasi yang selama ini sulit dilakukan perbankan pada umumnya.

Secara ideal, manajemen baru juga harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa mengemudikan bank ke arah yang lebih baik sekalipun tanpa orang asing di dalamnya. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pun mampu bekerja dan punya kemampuan sederajat dengan bangsa lain.

**SALAM SURYA**

# Harapan baru berantas korupsi

SETELAH melalui proses seleksi yang panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan yang dilakukan anggota Komisi II DPR, berhasil memilih Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Taufieqrohman Ruki, mantan perwira tinggi Polri terpilih sebagai ketua.

Empat orang lainnya terpilih sebagai anggota lembaga yang dirancang untuk membersihkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mereka adalah mantan pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan anggota Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, Amien Sunaryadi, mantan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sjahruddin Rasul, mantan Jaksa Tumpak Hatorangan Panggabean, dan mantan Dirut PT Timah Erry Riyana Hardjapamekas.

Terpilihnya para anggota dan pimpinan suatu badan yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan termasuk kasus korupsi masa lalu tentu menumbuhkan harapan atas pemenuhan salah satu aspirasi reformasi untuk memberantas praktik KKN.

Apalagi, dari sejak awal pembentukannya ditegaskan, komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat imparial, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Kehadiran KPK seyogianya merupakan angin segar di tengah semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini yang sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Sejak hampir satu dekade ini, secara terus-menerus sejumlah lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia.

Tetapi terpilihnya para pejabat publik yang nantinya diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi itu tak urung justru kembali menyiratkan pesimisme terhadap prospek dan masa depan pemberantasan korupsi, sebagai suatu penyakit menahun yang telah berakar, khususnya pada tataran birokrasi dan elite pemerintahan.

Selama ini upaya pemberantasan dan proses hukum atas kejahatan korupsi kita lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, penanganan kasus korupsi dan kejahatan keuangan yang sangat merugikan negara menjadi tidak lebih dari sekadar barang komoditas yang diperjualbelikan.

Tambahan lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu bentuk korupsi yang telah begitu mendarah daging di negara kita adalah korupsi dalam lembaga peradilan atau dikenal dengan istilah *judicial corruption*.

Karena itu KPK harus menunjukkan kinerja yang benar. Jika tidak hanya akan memperpanjang daftar komisi yang akhir-akhir ini banyak dibentuk dengan tingkat efektivitas kinerja yang masih dipertanyakan.

**SALAM SURYA**

# Pembatalan pemberangkatan haji

HAMPIR sebanyak 30.000 calon jamaah haji Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci. Alasannya, karena pemerintah Arab Saudi tidak menyetujui permintaan penambahan kuota yang diajukan 17 negara, termasuk Indonesia.

Kita sangat memahami betapa kecewanya mereka yang batal berangkat ke Tanah Suci. Sebab, haji bagi umat Islam, lebih-lebih lagi di Indonesia, adalah dambaan. Haji adalah ibadah dan punya gengsi sosial.

Berdasarkan perjanjian para Menteri Luar Negeri anggota Organisasi Koferensi Islam (OKI) di Yordania 1986, disepakati penduduk berjumlah 1.000 orang mendapat satu jatah calon jamaah haji (1:1.000).

Dengan perjanjian itu Indonesia mendapat jatah 205.000 calon jamaah haji. Itulah batas maksimal sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, khusus kuota haji pada 2004, juga sudah ada MoU yang diteken Menteri Agama Indonesia dan Menteri Haji Arab Saudi.

Karena banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar, yakni sebanyak 55.000 calon jamaah yang masuk *waiting list*, Menag Said Agil Husin Al Munawar, kemudian mengajukan tambahan 30.000 lagi ke pemerintah Arab Saudi. Tetapi, permintaan itu ditolak dengan aiasan telah sesuai kuota. Selain itu juga karena sarana peribadatan di Arab Saudi sudah tidak mampu lagi menampung jutaan jamaah.

Pemerintah memang sudah berupaya agar penambahan kuota itu disetujui. Indonesia telah melakukan negosiasi tingkat tinggi. Wakil Presiden Hamzah Haz mengirim surat kepada Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz selaku pemimpin tertinggi penyelenggaraan haji. Tetapi, hasilnya tetap nihil.

Gagal berangkatnya calon haji jelas kenyataan yang pahit bagi kita semua. Karena itu mesti diadakan koreksi mendasar agar penyelenggaraannya bisa lebih baik.

Penyelenggaraan haji di masa depan haruslah dilaksanakan secara profesional. Untuk itu perlu dipikirkan kembali soal monopoli penyelenggaraan yang kini dipegang Depag. Sulit rasanya departemen mengelola secara profesional karena Depag jelas bukan badan usaha.

Monopolinya tergolong besar karena Depag menguasai 95 persen pemberangkatan haji. Selebihnya baru diberikan pada swasta.

Kita sudah bosan mendengar berbagai persoalan yang menyangkut haji. Entah keterlambatan pemberangkatan atau bahkan pembatalan seperti kali ini. Kenapa urusan ibadah, kok jadi ruwet dan bernuansa bisnis?

Kita memang perlu menengok pada negara-negara tetangga seperti Malaysia yang menyerahkan urusan ini pada swasta. Dengan diurus swasta kita juga yakin ongkos akan lebih murah.

Dan paling penting semestinya kita tak perlu lagi berspekulasi dengan mengajukan tambahan kuota. Karena spekulasi ini juga akan memancing percaloan dan permainan.

## SALAM SURYA

# Buka dialog untuk kasus Lumajang

**PENCEKALAN** penggunaan GOR Wira Bhakti Lumajang untuk kegiatan halalbihalal, *istighotsah* dan pelantikan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Bupati Lumajang, Achmad Fauzi, terus menjadi polemik.

Melalui SMS yang dikirim ke Harian *Surya* terlihat pihak yang mendukung tindakan bupati dengan yang menolak, boleh dibilang berimbang.

Di internal PKB juga terjadi perbedaan pendapat. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Mahfudz MD, dan Ketua DPP PKB AS Hikam berada pada kubu yang menolak pencekalan. Sementara Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB, KH Cholil Bisri, bisa menerima kebijakan Fauzi tersebut.

Demikian pula kiai khos pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Idris Marzuki, menyatakan, bisa menerima tindakan Fauzi tersebut karena di internal PKB memang masih ada masalah.

Yang jelas, pihak Pemkab Lumajang dan PKB versi AS Hikam sama-sama bersikukuh dengan sikapnya. Bahkan dengan tegas Mahfudz menyatakan, persetan dengan bupati Lumajang. Artinya, bisa saja PKB mengabaikan tindakan bupati yang merasa memiliki otoritas perizinan.

**PENCEKALAN** terhadap acara PKB yang akan dihadiri Gus Dur tersebut memang tidak lepas dari konstelasi politik sebelumnya. Saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Lumajang, PKB pecah menjadi dua kubu.

Kubu DPC Lumajang yang dipimpin Hasan memilih Fauzi. Sedang kubu DPP yang dikomandani AS Hikam dengan Misbachul Munir sebagai aparat di bawahnya, memilih Munif Baisuni. Pilgub itu akhirnya dimenangkan Fauzi dengan skor telak.

Rupanya DPP tidak mau menerima kenyataan itu. DPP kemudian melakukan langkah pembekuan DPC Lumajang. Lantas membentuk DPC baru yang diketuai Misbachul Munir. Jadi sekarang ada dua kepemimpinan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kubu Hasan.

Bukan mustahil Fauzi merasa punya utang kepada kubu Hasan. Untuk itulah, ia melarang penggunaan GOR Wira Bhakti untuk pelantikan pengurus DPC Lumajang. Karena pelantikan itu sebenarnya merupakan "kudeta" terhadap kubu Hasan, barang tentu Fauzi tidak sampai hati. Atau bahkan harus berpihak kepada Hasan.

Dengan demikian, sulit diterima alasan Fauzi bahwa pencekalan itu justru untuk menunjukkan sikap netralnya atas persoalan internal PKB. Tetap dituduh sebagai pembelaan terhadap Hasan. Dan tindakan demikian dianggap sisa-sisa Orde Baru.

**JIKA** masalah ini menggelinding terus, dampaknya tidak baik bagi masyarakat. Bagaimanapun yang tersebar di masyarakat itu lebih banyak faktor emosi daripada penalarannya.

Apalagi masalah pembunuhan Ketua PAC Jatiroto KH Asmuni Ishak yang diduga juga rentetan dari Pilgub, belum selesai.

Untuk itu, kita berharap pihak PKB maupun pihak Pemkab Lumajang mau membuka dialog. Bagaimana masalah ini tidak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, PKB juga tidak untung karena proses konsolidasi partai akan terhambat. Pemkab juga rugi karena tenaga energinya terkuras untuk mengursi polemik tersebut.

Dari dialog, akan dapat dicapai penyelesaian yang membawa kemaslahatan semua pihak.

## SALAM SURYA

# Yesus hadir saat ini

**KETIKA** Yesus hadir di bumi ini lebih 2000 tahun yang lalu, manusia sedang dilanda krisis identitas dan moralitas yang hebat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas dan esensi khotbah-khotbah Anak Allah.

Yesus berhadapan dengan penguasa Romawi yang bengis, kemelaratan para nelayan, kebobrokan birokrasi, kemunafikan kalangan agamawan (kaum Farisi dan Saduki) dan diskriminasi antarkelompok.

Umat yang mengitari Yesus saat itu tengah dilanda krisis yang cukup kronis. Ketidakadilan, kesewenangan, dan kepongahan merajalela. Krisis-krisis itulah yang membuat mereka menantikan Sang Mesias, Sang Juru Selamat.

Yesus yang berada di tengah-tengah mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib pun segera mereka persepsi sebagai Sang Mesias, penyelamat yang akan membebaskan mereka dari segala persoalan kemasyarakatan.

Krisis-krisis kemanusiaan pun terobati seketika. Namun, ketika sosok yang menjadi *agul-agul* (benteng/kebanggaan) mereka dalam menghadapi Kaisar Romawi itu disalib, krisis yang sama kembali muncul dan menghantui mereka.

**KISAH** pada awal masehi itu kiranya juga terjadi pada saat ini dan di sepanjang zaman. Perayaan Natal selalu berhadapan dengan situasi yang kurang lebih sama dengan kondisi pada saat Yesus lahir, termasuk di negeri ini.

Para politisi berebut kekuasaan dan segala kemewahannya. Banyak di antara mereka yang berperilaku seperti Pontius Pilatus, ketika harus berhadapan dengan situasi dimana kebenaran dipertaruhkan. Daripada membela rakyat, para wakil rakyat lebih memilih bungkam.

Para penguasa lebih memilih memetieskan kebenaran seperti halnya Herodes membunuh bayi-bayi demi tidak hadirnya sosok yang disebut sebagai Kebenaran Sejati, Sang Pembebas, Sang Penyelamat dan Sang Raja Damai.

Situasi keadilan saat ini juga memprihatinkan. Pengadilan hanyalah tempat para ahli hukum beretorika dan merapalkan ayat-ayat yang telah kehilangan makna. Pengadilan menjadi tempat para 'orang-orang suci' menghancurkan hati nurani mereka yang lemah dan menutupi ketidakadilan mereka yang kuat.

**YESUS** saat itu juga harus berhadapan dengan para penegak hukum yang pekerjaannya hanya menyeret pelacur dan merajamnya. Saat mereka meminta pembedaan, Yesus menjawab dengan sederhana, "Kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan lempari perempuan ini dengan batu."

Kemiskinan dan problem kesehatan juga menjadi pekerjaan besar Yesus pada saat itu. Di mana-mana, Dia hadir menyembuhkan orang-orang yang didera berbagai penderitaan, penyakit, kesengsaraan, dan kemiskinan. Yesus memberi makan 5.000 orang, memenuhi jala nelayan dengan ikan dan membangkitkan orang mati.

Semua krisis tersebut terjadi karena manusia tak mampu merespons kehadiran-Nya. "Aku adalah kebenaran dan hidup," kata Yesus. Mereka yang tidak menyambut Dia (baca: Kebenaran dan Kehidupan) tidak akan sampai kepada kebenaran dan kehidupan. Mereka akan terus-menerus mengalami berbagai macam krisis.

Yesus hadir di dunia untuk menjawab krisis identitas dan moralitas. Setelah mati di kayu salib, Dia bangkit kembali. Ini merupakan pertanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan berbagai macam krisis, termasuk krisis identitas, moralitas dan kemanusiaan di sepanjang zaman. Tak perlu lagi manusia kehilangan jati diri dan moralitas, karena Yesus telah hadir di sini saat ini.

**SALAM SURYA****Parpol perlu rekening khusus**

AKANKAH Pemilu 2004 nanti bebas dari praktik politik uang? Nampaknya hal itu masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya belum ada UU yang mengatur tentang rekening khusus dana kampanye.

Padahal menurut beberapa pengamat, kepemilikan dana rekening khusus kampanye merupakan syarat partai politik siap mengikuti pemilihan umum.

Tetapi saat ini hal itu menjadi sulit karena Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur hal itu.

Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Kamis, UU Nomor 31/2002 tentang Partai Politik memang tidak menyebutkan soal sanksi bila parpol tidak memiliki rekening tersebut. Sehingga, untuk Pemilu 2004, parpol bisa dengan mudah melenggang ke arena pemilu tanpa harus memiliki rekening tersebut.

Memang parpol sudah menyerahkan nomor rekening, tetapi tak ada satu pun dari parpol-parpol itu yang melaporkan jumlah saldo awal yang dipunyai. Yang ada hanya nomor rekening dengan jumlah dana kosong.

Saldo awal ini penting dan bisa menjadi persoalan tersendiri. Sebab, dari situ sesungguhnya bisa dilacak asal-muasal dana kampanye, apakah dari sumber legal atau sebaliknya.

Masalah saldo awal ini juga bisa-bisa dijadikan alasan atau cara parpol berkelit jika, karena kita tahu bahwa ada pembatasan sumbangan dana bagi parpol. Artinya, bisa saja, parpol mengalihkan dana sumbangan parpol masuk ke rekening dana kampanye. Jelas tanpa adanya aturan ini parpol bisa memperoleh cara bagaimana pengalihan dana itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum.

Maka dari itu, bertolak dari pertimbangan akan makin sulitnya menuntaskan persoalan dana parpol dan dana kampanye, maka kita bila UU Parpol mesti diamandemen dengan memasukkan sanksi tegas soal rekening khusus dana kampanye. Jika tidak maka permainan politik uang sulit dibendung.

Jika politik sogok-menyogok berlangsung bisa juga terjadi apa yang disebut dengan sistem rente ekonomi antara penguasa, elit politik, dan pengusaha. Dalam sistem ini partai memanfaatkan pengusaha, sebaliknya pengusaha yang sudah menginvestasikan dana dalam jumlah besar pada partai akan kembali menuntut berbagai kemudahan agar investasi yang sudah ditanam kembali.

Jika itu terjadi, maka oligarki partai tidak bisa dielakkan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan mewabah sementara rakyat akan terpitgirkan.

Untuk itulah kita semua harus mewaspadaai keadaan ini. Masyarakat dan LSM bisa bekerja sama agar dana yang digunakan parpol transparan. Kemudian kita juga berharap pada proses penegakan hukum jika benar ada partai-partai mendapat dana ilegal. Dan sekali lagi belajar dari kasus ini, maka UU perlu diamandemen agar soal dana parpol ini bisa diawasi secara ketat.

**SALAM SURYA****Beratnya menjadi caleg**

CALON legislatif saat ini boleh dikata super sibuk mempersiapkan dirinya menjelang Pemilu 2004. Mereka saat ini sibuk-sibuknya mengurus surat-surat untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diberikan oleh KPU.

Ruwetnya persyaratan ini antara lain karena tidak jelasnya persyaratan yang diajukan KPU. Contoh, apakah surat tanda kelakuan baik cukup diperoleh di kantor polisi setempat atau harus ke pengadilan? Pengadilan tingkat apa?

Persyaratan lain juga bisa bikin puyeng. Seorang caleg memerlukan surat kesehatan. Menurut KPU sudah ada formulir yang standar, nomor BB7. Nayatanya, formulir nomor BB7 itu tidak tersedia di seluruh penjurut tanah air yang luas ini. Lagi pula, rumah sakit mana yang berwenang mengesahkan formulir tersebut? Di beberapa daerah terpencil, bagi seorang caleg tidak begitu mudah untuk pergi ke rumah sakit tingkat provinsi, umpamanya.

Dan inilah penyakit utama di negeri ini yakni masalah birokrasi. Untuk Pemilu 2004 birokrasi yang terkait untuk mengembangkan demokrasi cukup rumit.

Kita berasumsi KPU bersikap tulus dalam mengeluarkan berbagai persyaratan dan peraturan yang harus dipenuhi seorang caleg. Namun agaknya para anggotanya agaknya tidak sempat memikirkan secara tenang dan realistis kesulitan yang dihadapi di lapangan. Mungkin juga dikeluarkan terburu-buru karena didesak waktu, sehingga peraturan dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang.

Menyelenggarakan demokrasi di negara kepulauan yang paling luas di dunia (meliputi wilayah, kalau dibandingkan, yang membentang dari London sampai Ankara) dan melibatkan sekitar 140 juta pemilih, jelas, bukanlah tugas yang mudah.

Karena itulah sekarang bukanlah teori-teori politik tentang demokrasi yang diperlukan. Semua pihak harus menunjukkan kesediaan untuk memperlancar proses penyusunan caleg untuk berbagai lembaga perwakilan, terutama perwakilan tingkat kabupaten.

Yang terjadi, ada saja kecenderungan pada diri seorang pejabat atau petugas untuk mempersulit sebuah proses yang harus dipenuhi. Seakan-akan usaha demokratisasi yang ingin didorong belum berkenan bagi pejabat atau petugas.

Daftar caleg sangat penting dan menentukan. Sebab, berbeda dengan pemilihan umum di masa silam, di kotak suara 5 April 2004, pemilih tidak hanya berhadapan dengan nomor urut dan tanda gambar partai. Namun, juga berhadapan dengan nama orang-orang yang diajukan masing-masing partai.

Ketokohan sang calon menjadi faktor yang turut menentukan perolehan suara sebuah partai di suatu wilayah pencoblosan. Tetapi kalau persyaratan caleg sedemikian ruwet jangan-jangan caleg yang berkualitas akan gagal dan sebaliknya caleg yang avonturir politik yang berhasil. Kalau ini terjadi Pemilu 2004 benar-benar tragis. (\*)

## SALAM SURYA

# Kita tinggalkan 2003

**BESOK** kita meninggalkan tahun 2003. Umur kita bertambah satu tahun. Yang seringkali tanpa kita sadari, sebenarnya kita justru setahun mendekati kematian.

Banyak kenangan, pengalaman, goresan perjalanan sepanjang setahun. Yang pahit maupun yang manis. Yang getir maupun yang nikmat. Yang menyayat maupun yang menghibur.

Salah satu cara terbaik meninggalkan tahun 2003 adalah dengan melakukan perenungan diri: apakah kita telah mengisi setahun perjalanan sejarah kita dengan peningkatan kualitas hidup. Ataukah kita justru telah melewati setahun umur kita dengan sia-sia.

Untuk itu, kita coba berdiam sejenak di kegelapan malam. Duduk istirahat. Memejamkan mata. Kita urai lagi satu per satu perjalanan kita sepanjang tahun 2003 ini.

TENTU saja, perenungan harus dilandasi dengan kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri. Berani mengakui kesalahan, kelemahan, kedurhakaan dan keaniyaan diri sendiri.

Sebab tanpa kejujuran, maka perenungan menjadi kehilangan panduan. Kebeningan hati tidak akan pernah terwujud. Kalau dipaksakan, tidak akan menghasilkan sesuatu yang sah.

Salah satu agenda perenungan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri secara jujur dan sah: nikmat mana dari Tuhan yang aku dustakan?

Pertanyaan ini merupakan pengakuan bahwa apa yang kita nikmati, kita rasakan adalah karunia Tuhan. Semua ini dari bermula tidak ada menjadi ada. Dari kosong menjadi wujud. Ini semua berkat kemurahan Tuhan.

Tetapi seringkali kita lupa. Yang kita makan, kita pakai, kita nikmati seolah hasil kerja kita sendiri tanpa keterlibatan Tuhan. Lantas kita dengan sombong merasa bisa berdiri sendiri. Bisa menjadi ada tanpa ada yang memberadakan.

Dengan kita bertanya: nikmat mana dari Tuhan yang aku dustakan, kita akan rendah hati kepada Tuhan. Kita akan *sedepile*, bersandar penuh dengan kepasrahan kepada Sang Maha Diga. Ya.

AGENDA perenungan kedua yang dapat kita pakai adalah apakah perjalanan sepanjang tahun 2003 sudah kita pakai meningkatkan kualitas hidup. Dalam arti menjadikan hidup kita ini punya makna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Bisa saja kita kaya. Bisa saja kita hidup bermewah-mewah. Terpenuhi segala yang kita inginkan. Tetapi itu semua bukan berarti hidup kita berkualitas.

Seringkali kita salah menggunakan parameter. Kualitas hidup kita ukur semata-mata dari fisik, material, bahkan *hedonisme*. Itu semua parameter yang menjebak.

Kualitas hidup haruslah menggunakan parameter takwa untuk mengukur hubungan dengan Tuhan. Kemudian parameter amal kebajikan terhadap sesama manusia, sebagai parameter kemanusiaan.

Takwa dan amal kebajikan merupakan dua parameter yang saling berkait dan tak terpisahkan. Kadar ketakwaan seseorang diukur dari amal kebajikannya. Kemudian amal kebajikan punya makna kalau dilandasi dengan takwa.

Mari lah kita tinggalkan tahun 2003 dengan semangat meningkatkan kualitas hidup di tahun 2004.

## SALAM SURYA

# Partai politik abaikan etika

**P**EMILIHAN umum (pemilu) 2004 masih beberapa bulan lagi. Belum masanya berkampanye. Tetapi pada kenyataannya kita menyaksikan parpol mencuri start dengan melakukan kampanye.

Kita melihat di mana-mana bendera, umbul-umbul, gambar parpol dipasang. Di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, di rumah-rumah pribadi, di atas pohon. Pola pemasangannya menunjukkan adanya persaingan, perlombaan secara ketat dan besar-besaran.

Di samping itu, parpol mulai melakukan kegiatan pengerahan massa. Ada yang dikemas dalam halaihalal, ulang tahun partai, *istigotsah*, temu kader. Apa pun namanya, yang jelas kita lihat adalah bentuk kampanye secara terselubung.

Persaingan dan perlombaan ini telah menyentuh kerawanan berupa konflik antarmassa parpol. Di Jember, bendera Partai Golkar dibakar orang tidak dikenal.

Golkar mengancam akan membalas. Kalau nanti Golkar benar-benar membalas, dipastikan suhu politik menjadi panas dan cenderung mendidih.

Kita juga melihat kegiatan partai politik yang cukup provokatif. Misalnya menyelenggarakan kegiatan pengerahan massa di daerah yang dikenal sebagai basis partai lain. Hal demikian akan sangat mudah menyulut konflik antarmassa parpol.

Kampanye terselubung juga dibumbui dengan sikap arogan parpol. Di Madura misalnya, ada partai yang mengklaim suatu kawasan tertentu hanya untuk bendaranya. Ada partai yang melakukan pemaksaan kepada rakyat agar memasang bendera dan gambar partai tersebut.

APA yang dilakukan parpol sekarang jelas-jelas mengabaikan etika politik. Dalam arti sengaja melanggar aturan. Melanggar tata krama hidup berbangsa dan bermegara.

Kalau sudah begitu, kita hanya bisa prihatin dan bertanya, mau dibawa ke mana bangsa ini oleh partai politik?

Kita sebenarnya berharap, partai politik akan menjadi ujung tombak pengentasan bangsa ini dari keterpurukan. Melalui kiprah politik yang jujur, adil. Melalui pemikiran yang visioner. Melalui sikap kenegarawanan, dalam arti mengedepankan kepentingan bangsa secara luas. Bukan hanya kepentingan kelompok dan golongan.

Tetapi dengan realitas yang ada, kita jadi pesimistis bangsa ini akan terentaskan dari keterpurukan. Lihat saja, parpol memberikan contoh perilaku tidak jujur. Praktik mencuri start menunjukkan parpol tidak memiliki pemikiran yang visioner. Parpol tidak mengedepankan kepentingan bangsa secara luas.

UNTUK itulah kita berharap parpol mau mengendalikan diri untuk tidak melanggar etika. Parpol harus memiliki paradigma bagaimana menang secara bermartabat. Bukan menang karena menghalalkan segala cara.

Dari situlah kita boleh mengharap terjadinya pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sebab, mustahil terjadi demokrasi jika tidak ada etika politik. Pelanggaran etika politik hanya akan melahirkan destruksi politik baru yang susul menyusul.

## SALAM SURYA

## Politikus busuk

**DEKLARASI** agar masyarakat tidak memilih politikus busuk digelar Senin (29/12-2003). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemudian berniat menyusun daftar politikus busuk untuk disebarluaskan kepada publik.

Harapannya, orang-orang yang dicap sebagai politikus busuk itu diharapkan tidak dipilih rakyat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 nanti.

Teten Masduki, Ketua Indonesia Corruption Watch menetapkan empat dosa yang menyebabkan seseorang layak disebut politikus busuk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); Terlibat kejahatan terhadap hak asasi manusia; Terlibat kejahatan seksual, dan terlibat kejahatan terhadap lingkungan.

Namun sayang, deklarator tidak jadi mengumumkan daftar politikus busuk versi mereka. Padahal kalau ini jadi, jelas akan meramaikan pemilu. Dalam masyarakat nantinya akan beredar dua versi daftar. Versi pertama adalah daftar calon anggota legislatif yang disusun 24 partai politik (parpol). Dan, kedua, adalah versi LSM yang berisi nama-nama politikus yang masuk daftar hitam. Maka, kita akan menyaksikan nama-nama terpilih versi parpol dan nama-nama terlarang versi LSM.

MESKI tak diakui secara langsung nampaknya tidak jadinya pemunculan daftar politikus busuk itu disebabkan mereka takut digugat. Para pemimpin LSM akan diadukan ke polisi karena pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan.

Nampaknya, melawan politikus busuk itu tidak mudah. Tetapi apa yang ditempuh LSM kali ini adalah buntut dari keputusan terhadap rumitnya jalan yang harus dilalui masyarakat Indonesia untuk melawan korupsi dan manipulasi.

Apa yang dikampanyekan LSM merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga politik. Reformasi ternyata belum mampu membangkitkan partai-partai politik untuk menjadikan dirinya sebagai penyangga mutu dan penjaga moral.

Karena itu, kampanye melawan politikus busuk hendaknya dipahami sebagai kerisauan terhadap ketidakpedulian politik terhadap moral.

Dan hal itu nampaknya harus dilakukan sekarang karena momentumnya tepat. Praktik korupsi di Tanah Air hampir selalu berkait politik, karena kekuatan politik selalu bisa melindungi koruptor.

Karena itu bisa dipahami bahwa makin banyak saja orang rakus yang duduk sebagai wakil rakyat, baik di tingkat pusat hingga daerah. Karena itu tepat semboyan yang dipakai LSM memerangi politikus busuk, "Ambil uangnya, jangan pilih mereka." Dengan semboyan ini kita berharap pemilih sadar benar siapa yang akan dipilih.

Gerakan ini nampaknya harus terus didengarkan. Jangan sampai isu politikus busuk ini berhenti hanya sebatas deklarasi. Harus ada cara-cara lain yang ditempuh agar gerakan ini berkelanjutan hingga pemilu usai.

## SALAM SURYA

## Antisipasi sapi gila

SAPI gila (*mad cow*) menyerang Amerika Serikat. Penyakit mematikan yang masa inkubasinya bisa mencapai 16 tahun itu pernah menyerang Inggris dan Kanada. Banyak negara di dunia yang menggantungkan impor daging serta merta menghentikan impor daging sapi dari negeri adidaya itu.

Amerika kemudian menuding Kanada sebagai negara yang mengirim penyakit itu ke AS, tetapi tetap saja puluhan negara yang selama ini mengimpor daging sapi dan produk turunannya dari Amerika menolaknya.

Negara yang menghentikan impor daging AS antara lain Jepang, Meksiko, Korsel, China, Hongkong, Kanada, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Rusia, Brasil, Uni Emirat Arab, Peru, Paraguay, dan 15 negara Uni Eropa.

Yang perlu digarisbawahi sapi gila tidak hanya masalah daging, tetapi juga akan berimplikasi pada produk-produk turunannya seperti susu dan keju.

**KEBUTUHAN** daging sapi Indonesia memang tidak bergantung pada AS, tetapi pada Australia. Namun, produk-produk turunannya cukup banyak beredar di Indonesia seperti dibuktikan saat *sweeping* di berbagai supermarket oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, kita mesti cepat menyikapi sapi gila Amerika itu.

Indonesia dalam menyikapi soal sapi gila memang agak terlambat. Senin (29/12), pemerintah baru mengumumkan sikap resminya. Padahal, penjelasan kepada masyarakat sungguh perlu sesegera mungkin. Namun, herannya, belum ada satu pun orang yang punya otoritas dalam bidang itu secara resmi bicara. Menjelaskan kepada publik.

Padahal soal sapi gila itu sudah merebak seminggu sebelumnya. Anehnya, seperti kata Kepala Badan Karantina Pertanian Budi Triakoso, pihaknya belum melakukan langkah apa pun untuk mengantisipasi masuknya daging sapi impor dari Amerika. Alasannya, masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan instansi terkait.

Kita memang perlu hati-hati mengeluarkan pengumuman itu karena akan berimplikasi luas menyangkut dunia bisnis. Namun, mestinya jangan lambat karena negara lain cepat melakukan antisipasi melindungi konsumen mereka.

Kita memang belum punya catatan soal sapi gila. Namun, siapa yang bisa menjamin daging sapi gila kini belum memasuki wilayah negara kita? Karena pasti harganya lebih murah. Dan, biasanya sesuatu yang murah menjadi daya tarik konsumen, tanpa memikirkan risikonya.

Dulu kita pernah punya catatan dengan paha ayam AS. Paha ayam yang ditolak oleh beberapa negara, mengandung kolesterol tinggi diterima Indonesia. Padahal, masyarakat menolaknya. Dalam soal ini konsumen menjadi korban. Dua kali pengalaman rasanya cukup agar di masa datang kita harus cepat bertindak, karena bukannya tak mungkin produk-produk rekayasa genetika yang belum jelas keamanannya menyerbu pasar kita.

## SALAM SURYA

# Sikap Persikmania yang sportif

BEGITU Persik Kediri ketinggalan dari PKT Bontang 1-2 pada babak kedua di Stadion Brawijaya Kediri, Minggu (4/1), kita sempat khawatir, Persikmania akan marah, *ngamuk*, dan berbuat anarkis.

Kekhawatiran demikian didasarkan pengalaman sebelumnya ketika Persikmania bentrok dengan aparat keamanan, saat berlangsung pertandingan melawan PSIS Semarang 27 Desember lalu. Saat itu pertandingan berkesudahan 1-1.

Di samping itu, gejala umum di dunia Liga Pro Mandiri, begitu tuan rumah kalah, maka pendukungnya akan *ngamuk* tanpa juntrungnya. Mulai dari aksi melempar di dalam stadion sampai dilanjutkan berbuat anarkis di luar stadion.

Semua itu bermula dari endapan psikologis suporter bahwa tim kesayangannya harus menang. Apalagi menjadi tuan rumah. Kemenangan itu mutlak. Kemenangan itu citra, harga diri.

Tidak lagi mempedulikan bahwa dalam sebuah pertandingan olah raga, menang dan kalah itu suatu hal yang biasa. Yang penting bagaimana pertandingan berlangsung secara *fair play*. Sportif. Baik dari mereka yang bertanding, penyelenggara maupun penonton.

YANG terjadi di Kediri ternyata di luar kekhawatiran. Persikmania menunjukkan sikap sportif. Mereka tetap bersikap *fair* hingga pertandingan berakhir.

Sebenarnya ada upaya pancingan yang membuat mereka marah. Mereka mengamuk. Menyalahkan lawan maupun wasit dan pemain sendiri. Sehingga begitu pertandingan berakhir, ada yang membakar kertas di tribun.

Tetapi semua upaya pancingan itu tidak mempan. Memang ada sedikit cacian terhadap wasit, tetapi hanya sebentar. Ada sedikit saling lempar antara aparat dengan penonton, tetapi hanya insiden kecil.

Secara umum, semua berakhir dengan *happy ending*. Damai. Persikmania bisa menerima kekalahan karena PKT memang tampil lebih bagus. PKT menunjukkan koordinasi permainan yang rancak. Seluruh lini dinamis.

Pemain-pemain PKT bermain tenang. Sebagai tamu, ternyata tidak menunjukkan permainan defensif. PKT tetap bermain ofensif. Padahal kecenderungan kuat di Liga Pro Mandiri, tim tamu biasanya bermain defensif untuk memaksakan hasil seri.

Sebaliknya Persik tampil di bawah bentuk permainannya. Lini tengah tidak efektif sehingga tidak bisa melancarkan pasokan bola yang matang ke lini depan.

Persik tampil tanpa improvisasi. Kelihatan mereka terlalu lelah. Terperas tenaganya untuk mengikuti pelbagai turnamen dan pertandingan sebelumnya.

Persikmania bisa menerima kepemimpinan wasit yang cukup cermat dan tegas. Tatkala pemain Persik Wawan menjatuhkan diri di dekat penalti, wasit bersitegas tidak memberi hadiah penalti. Jelas keputusan yang sangat berani dengan risiko dicaci penonton.

KITA berharap, sikap Persikmania demikian bisa dipertahankan. Hendaknya, suporter kesebelasan lain bisa meneladani sikap Persikmania. Sikap sportif suporter merupakan pilar penting dalam rangka membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik.

## SALAM SURYA

# Antisipasi bencana sejak dini

PADA awal tahun 2004 ini, kita dikejutkan dengan terjadinya bencana di beberapa daerah di Jawa Timur. Antara lain badai di Sidoarjo yang merusak 275 rumah dan bangunan. Bencana serupa juga terjadi di Kediri yang menelan korban jiwa satu orang.

Kejadian ini mengharuskan kita untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana yang lebih berat. Sebab, Jawa Timur memiliki kerawanan terjadi bencana alam. Misalnya, tanah longsor seperti yang terjadi di penghujung tahun 2003 di Malang selatan.

Kenapa tanah longsor merupakan kerawanan paling tinggi? Semua ini bermula dari kerusakan ekosistem akibat penjarahan hutan, dan alih fungsi perkebunan menjadi lahan pertanian semusim.

Seperti yang terjadi di Malang, Lumajang, Jember. Perkebunan yang berisi tanaman keras dibabat diganti dengan tanaman semusim. Sementara tanaman semusim tidak begitu bagus untuk konservasi.

Di samping tanah longsor, Jawa Timur juga menyimpan kerawanan banjir. Ada daerah yang secara topografis memang rawan genangan banjir.

Untuk daerah langganan banjir, persoalannya tidak terlalu kompleks karena sudah bisa diantisipasi jauh hari. Berbeda dengan daerah rawan banjir bandang. Banjir yang datang secara tiba-tiba dan hampir tidak diantisipasi. Ini rawan terhadap jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Contohnya, banjir bandang di Malang selatan. Jelas hampir tidak diantisipasi karena tidak ada preseden sebelumnya. Tiga tahun lalu, banjir bandang menelan lebih 25 korban jiwa di Pacet, Mojokerto.

Daerah rawan banjir bandang ini juga sulit dipetakan. Pemerintah belum memiliki peta yang sah terhadap daerah-daerah rawan banjir bandang.

Di samping tidak memiliki peta yang sah, pemerintah juga terkesan tidak memiliki program yang konkret dan berkesinambungan terhadap penanganan daerah-daerah rawan banjir bandang. Yang diperhatikan cenderung hanya daerah banjir genangan atau langganan banjir seperti Bojonegoro, Lamongan, Tuban.

UNTUK itulah kita berharap, harus ada langkah konkret dan berkesinambungan untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang, yang merupakan jenis bencana alam yang paling rawan di Jatim ini. Tentu saja, kita juga tidak bisa mengesampingkan jenis bencana yang lain seperti tsunami, badai.

Langkah yang diambil pertama-tama adalah membuat peta daerah rawan banjir bandang secara sah. Jelas ini membutuhkan kerja keras karena memetakan daerah banjir bandang tidak mudah. Dibutuhkan akurasi yang observasi secara menyeluruh hingga lingkaran luar.

Kedua, menyiapkan aparat, terutama mentalitasnya. Mentalitas aparat sudah terbentuk dengan pola bencana tradisional, yaitu yang biasa terjadi. Sehingga pola kerjanya miskin inovasi dan kreativitas.

Harus diberi pemahaman bahwa bentuk bencana sekarang juga semakin bervariasi. Membutuhkan antisipasi secara cermat.

Dan tidak kalah penting adalah menyiapkan logistik untuk bantuan. Ada kecenderungan pemerintah tidak siap dengan logistik sebagai instrumen pertolongan pertama kepada korban.

## SALAM SURYA

# Iptek kita tertinggal

ILMUWAN AS berhasil mendaratkan wahana tak berawak Spirit di Planet Mars. Memang bukan kali ini saja AS berhasil mendaratkan wahana tak berawaknya di planet merah itu karena sebelumnya mereka berhasil mendaratkan Viking tahun 1976 dan Pathfinder awal 1990-an.

Namun keberhasilan AS ini menjadi penting karena negara-negara Eropa juga mengirim wahana tak berawak ke Mars. Namun mereka gagal mendapatkan berita dari Mars kendati mereka sudah sampai di planet itu.

Belakangan ini beberapa negara sangat giat menjelajah ruang angkasa. Negara-negara Eropa sudah pula memulai misi-misi ruang angkasanya. Rusia, meski dalam kondisi kekurangan dana, tetaplah menjadi bangsa yang diperhitungkan kehadirannya di langit. Dan China, telah berhasil mengirimkan manusia ke orbit dengan roket buatan sendiri.

Nampak sekali bahwa negara-negara itu sudah langkah lebih jauh dan tidak sekadar ingin menambah pengetahuan dari penjelajahan ke Mars. Mereka sudah lebih dari itu yakni mencari jejak kehidupan dan kalau perlu membuat koloni di Mars.

DAN kita? Yang terjadi di tanah air sepertinya bertolak belakang dengan perkembangan itu. Satu-satunya pabrik pesawat yang pernah kita banggakan, PT Dirgantara Indonesia, malahan merumahkan sebagian besar karyawan. Jangankan menciptakan pesawat canggih membayar karyawan pun kita tidak mampu, apalagi ikut nimbung dalam penjelajahan ruang angkasa.

Bila kita tengok perkembangan pengamatan ruang angkasa negara lain, makin tampaklah bahwa kita sungguh tertinggal. Ketika NASA meluncurkan teleskop-teleskop ruang angkasa yang mengorbit Bumi (Spitzer, Hubble, Chandra X-Ray dan Compton Gamma Ray Observatory), kita masih harus berjuang agar observatorium kita tidak terpolusi oleh cahaya sekitarnya. Sungguh kita amat tertinggal.

Mengingat segala fakta di atas, patutlah kita merenung, apa yang salah dengan bangsa kita? Saat orang lain berusaha meraih pengetahuan, kita sibuk debat mengenai kurikulum. Soal kurikulum belum tuntas muncul soal biaya pendidikan yang melangit.

Ketika bangsa-bangsa lain melebarkan jelajahnya ke planet lain, meneliti satelit-satelit alam di tata surya untuk mencari koloni baru, kita sibuk mencari tanah-tanah baru untuk dikuasai, kalau perlu dengan menggusur orang-orang lemah.

Saat teleskop-teleskop seluruh dunia mencari bintang-bintang dan menyelidiki fenomena kosmis, kita berebutan meneropong posisi di pemerintahan, walau tidak memiliki visi. Janji-janji dilayangkan setinggi langit, namun tidak sedikit pun pengetahuan mengenai langit kita selami atau diupayakan untuk digali.

Kapan kita mulai mengejar ketertinggalan itu? Mungkin ketika urusan perut sudah tak mengganggu kita lagi. Bila pikiran tenang saat itulah daya pikir dipakai untuk memajukan teknologi dan penemuan-penemuan luar biasa akan tercipta. Kapan hal itu tercapai? Nampaknya tidak akan tercapai karena nampaknya kita masih sibuk memperkaya diri dan memuaskan nafsu keserakahan.

## SALAM SURYA

# Makna kemenangan mutlak Maschut

PASANGAN Maschut-Edianto menang mutlak dalam pemilihan Wali Kota Kediri. Dari 30 kursi yang ada di DPRD, Maschut mengantongi suara 29. Satu suara direbut pasangan Sujud Kendar-M Zaini. Sedang pasangan Bambang Supriyono-Yulianto tidak memperoleh suara sama sekali.

Soal Maschut bakal menang, sudah dapat diprediksi jauh hari. Karena kinerjanya dinilai cukup baik oleh masyarakat. Dengan gayanya yang *low profile*, dia bisa menggerakkan potensi masyarakat.

Ia juga pintar menyenangkan hati masyarakat. Contohnya bagaimana sukses dia mengembangkan Persik Kediri menjadi juara Divisi Utama Liga Pro Indonesia. Prestasi Persik yang spektakuler telah mengangkat citra dan kebanggaan masyarakat Kota Tahu ini.

Indikator-indikator sosial dan ekonomi memang mengalami perbaikan selama dipegang Maschut. Pembangunan infrastruktur bertambah sehingga kiprah pemerintahannya dirasakan rakyat.

Hubungan Maschut dengan DPRD sangat baik. Sejak awal sudah terdengar kabar bahwa partai-partai kunci seperti PDIP dan PKB akan memilih dia.

YANG mengejutkan adalah kemenangan mutlak. Ini spektakuler. Ini yang tidak diduga sebelumnya. Ini yang pertama kali terjadi dalam sejarah pilwali di Indonesia selama zaman reformasi.

Bahkan pada zaman Orde Baru pun tidak pernah terjadi. Walaupun saat itu selalu ada calon utama dan calon pendamping. Biasanya calon pendamping tetap diberi suara dua atau tiga.

Atas kemenangan mutlak ini kita bisa menangkap makna bahwa suara sekarang tidak bisa secara ketat diatur dengan sistem jatah seperti Orde Baru.

Buktinya, Fraksi Partai Golkar sendiri tidak bisa memaksakan anggotanya untuk memilih jagonya, Bambang Supriyono. Sehingga terkesan, Golkar telah dengan semena-mena mengorbankan Bambang untuk menerima aib yang sangat berat.

MAKNA lain yang harus kita simak dari kemenangan mutlak ini adalah peringatan dari Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung dikorup. Semakin mutlak kekuasaan semakin mutlak pula korupsi.

Dengan kemenangan mutlak ini berarti hubungan Maschut dengan dewan akan sangat baik. Dewan yang memilih pasti akan berusaha mengamankan sampai selesai lima tahun.

Ini akan berbahaya kalau dalam mengamankan dewan meminta konsesi. Dewan meminta imbal jasa. Maka yang akan terjadi adalah persekongkolan antara legislatif dan eksekutif. Bapak Amerika, Benjamin Franklin pernah memperhitungkan, bahaya demokrasi apabila eksekutif dan legislatif bersekongkol.

Untuk itu, kita berharap Maschut tidak sampai masuk perangkap persekongkolan demikian. Sejak awal harus sadar bahwa kiprahnya tidak cuma dipertanggungjawabkan kepada dewan, tetapi yang lebih utama adalah kepada rakyat.

Kita berharap Maschut tidak sampai lupa. Menjadi arogan. Melainkan tetap istiqamah dengan sikap dan perilakunya seperti selama ini, yaitu *low profile*, sahaja, rendah hati, *mendulur* dengan masyarakat. Tetap *eling lan waspada*. Sehingga cintanya rakyat Kediri kepada dia benar-benar *lahir tumusing batin*.

Dengan dukungan lahir-batin dari rakyat, maka insya Allah Maschut akan selamat dan sukses menjalankan pemerintahannya periode kedua ini.

## SALAM SURYA

# Parpol tak siap caleg

**SINYALEMEN** yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses persiapan pemilu itu, kurang siap nampaknya ada benarnya. Buktinya, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan batas waktu penyerahan daftar bakal calon legislatif (caleg) oleh partai politik tanggal 29 Desember 2003, ternyata hanya satu partai yang menyerahkan daftar dimaksud sehari sebelumnya.

Selebihnya atau 23 partai politik peserta (kontestan) pemilu baru menyerahkan daftar bakal calegnya beberapa jam sebelum batas waktu yang ditetapkan. Alasan paling utama tersendatnya penyerahan daftar itu menyangkut penentuan nomor urut caleg.

Demikian juga ketika KPU meneliti kelengkapan persyaratan caleg yang diajukan partai politik, ternyata hanya 1.611 orang dari 8.871 calon yang memenuhi syarat. Bahkan ada dua partai politik yang calegnya sama sekali tidak ada yang memenuhi kelengkapan persyaratan.

Akibatnya, daftar itu harus dikembalikan kepada partai bersangkutan untuk dilengkapi. Dampaknya jelas serius karena memakan waktu padahal hari pelaksanaan pemungutan suara tinggal beberapa bulan lagi.

Dari kejadian itu, memberi sinyal bahwa para kontestan kurang siap dalam menghadapi pemilu mendatang khususnya menyangkut caleg. Kekurangsiapan itu dapat dimaklumi kalau hal itu dilakukan oleh partai politik yang baru pertama kali ikut menjadi kontestan. Tapi kalau dilakukan oleh kontestan lama tentunya perlu dipertanyakan.

Partai lama yang ikut pemilu tentu tahu apa isi UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu itu, karena para politisi itulah yang duduk di DPR sehingga dengan sendirinya sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi bagi pengajuan seorang caleg. Berdasarkan kenyataan itu, maka sebenarnya tidak ada alasan tidak mengetahui atau tidak ada waktu untuk melengkapi persyaratan yang diminta bagi parpol lama.

**KARENA** itu, kenyataan begitu minimnya caleg yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, sudah pasti terkait dengan kurang siapnya partai politik dalam menghadapi pemilu. Kesiapan tidak terbatas masalah administrasi tetapi lebih pada masalah mendasar, yaitu konsolidasi organisasi dan kaderisasi partai. Apabila partai politik tersebut memang benar-benar terkonsolidasi secara menyeluruh termasuk pengaderan, maka kelengkapan syarat bagi seorang caleg seperti diminta KPU itu, bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi.

Tapi persyaratan yang diminta itu menjadi sangat sulit akibat tidak adanya proses pengaderan. Kenyataan ini diperparah sebagai akibat penentuan nomor urut atau peringkat daftar caleg. Seorang caleg yang diposisikan tidak nomor jadi alias 'nomor sepatu', sudah barang tentulah agak ogah-ogahan melengkapi syarat-syarat yang diminta. Sebab pengajuannya sebagai caleg oleh partai hanya aksesori atau untuk gagah-gagahan saja.

## SALAM SURYA

# Rekor di pasar saham

**KEJUTAN** datang dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) hari Jumat (9/1) ketika Index Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai angka 753,692 poin, suatu tingkat tertinggi dalam sejarah pasar saham dengan penguatan 22,677 poin atau 3,13 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya.

Perkembangan ini menggembirakan kita semua ketika sektor yang dipandang sebagai salah satu indikator ekonomi suatu negara menebarkan rasa gembira bagi para pelaku pasar.

Penguatan IHSG di BEJ hingga ke angka yang tinggi itu, juga lebih tinggi dibanding kenaikan indeks di pasar global. BEJ naik 6 persen sedang pasar bursa kawasan lain berkisar 1 hingga 3 persen.

Perkembangan ini terjadi ketika kita berada dalam suatu situasi makro politik dan ekonomi yang tak pasti. Yang jadi pertanyaan apa yang mendorong perkembangan IHSG di BEJ mencapai suatu tingkat fantastis dibanding bursa efek di negara lain? Jawaban yang mendekati kebenaran adalah para investor asing melihat setitik cahaya di sektor pasar saham Indonesia meski mereka tahu situasi ini bisa berubah akibat konflik sosial yang berada di luar wilayah pasar bursa.

Kemungkinan lain para investor asing berspekulasi di pasar bursa Indonesia karena *gain* yang diraih sangat besar dibanding dengan yang mereka peroleh di negara lain.

Ini terlihat jelas pada *net buying* (pembelian lebih besar dibanding transaksi jual) yang dalam perdagangan Jumat (9/1) mencapai Rp 1,6 triliun. Padahal, *net buying* yang terjadi sepanjang 2003 hanya Rp 9,7 triliun.

**PARA** investor memperkirakan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 takkan diganggu sabotase yang berujung pada perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Indonesia yang sah oleh pihak yang merasa Indonesia adalah milik mereka dan keluarga mereka. Tanda-tanda menuju sabotase sejauh ini memang belum ada.

Para investor asing memang melihat bahwa konflik yang terjadi sekarang boleh dikatakan masih berada pada tataran intelektual dan mereka berkeyakinan tidak akan terjadi hal-hal buruk saat pemilu nanti.

Dengan demikian jelas pesan bagi para pengambil dan para politisi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya dan tidak rasional. Jika hal ini bisa kita jaga maka perekonomian kita akan bisa terjaga dan peristiwa saat kerusuhan menjelang reformasi seperti dahulu tidak terjadi lagi.

Namun penguatan fantastis di bursa saham itu juga perlu kiota sikapi hati-hati, karena agak ganjil. Sektor riil belum bangkit dan saham menguat mencolok—bisa juga diartikan ada pemain yang tak jujur. Boleh jadi ada sekumpulan orang yang melakukan pencucian uang dan memasukkannya ke bursa kita. Ini bisa terjadi karena pengalaman dan regulasi kita masih lemah. Semoga hal ini juga dicermati para pengambil keputusan.

## SALAM SURYA

Selisih pendapat  
jaksa-polisi

MASYARAKAT kini disuguhi kebingungan baru. Kebingungan itu, lagi-lagi disebabkan oleh tidak menyatunya persepsi tentang legalitas hukum di antara para penegak hukum itu sendiri.

Kini masalah seperti itu muncul dalam kasus status hukum Syahril Sabirin—mantan Gubernur BI dan Ary Suta, mantan Kepala BPPN, dalam kasus penyalahgunaan Rekening 502.

Dalam kasus Rekening 502 perbedaan terjadi antara kejaksaan dan kepolisian mengenai kedua orang tersebut. Kejaksaan *ngotot* bahwa keduanya sudah menjadi tersangka dalam kasus Rekening 502.

Kasus Rekening 502 sendiri berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu yang lalu. BPK lalu melaporkan temuan tentang kejanggalaan penggunaan dana pada rekening itu sebesar Rp 20 triliun lebih kepada polisi.

Maka, dimulailah penyelidikan oleh polisi. Berita tentang dugaan yang mengarah kepada tersangka tertentu, muncul dan tenggelam. Sampai pada akhirnya pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memboycorkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta. Publik pun geger.

Tetapi, kembali publik juga dibikin geger dan bingung karena ternyata polisi membantah. Tidak tanggung-tanggung Kapolri Da'i Bachtiar ikut berbicara. Menurut Da'i belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus penyelewengan dana Rekening 502.

Masih dari polisi, Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol Erwin Mappaseng ikut berbicara. Menurut Erwin, polisi memang telah menetapkan tersangka, tetapi tidak bersedia menyebut nama.

Senada dengan Da'i, Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol Sugiri mengatakan, sampai saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan.

PIHAK kejaksaan tinggi yang merasa benar-benar menerima SPDP terheran-heran mengapa soal tersangka Rekening 502 ini menjadi keributan besar. Banyak petinggi polisi berbicara seakan-akan yang dikatakan kejaksaan tidak benar.

Publik jelas bingung ketika petinggi kedua instansi ini berpolemik melalui pers tentang sudah atau belumnya sejumlah nama menjadi tersangka Rekening 502.

Lagi-lagi masalah penegakkan hukum di negeri yang kita cintai ini tidak jelas jika menyangkut figur-figur tertentu. Hukum nampaknya hanya berlaku bagi orang-orang kecil.

Apa yang ada di balik sikap polisi dan kejaksaan memang kita tidak tahu. Tetapi menyangkut kasusnya yang menyangkut uang dalam jumlah banyak—publik pun akan tahu bahwa sedikit atau banyak masalah itu punya peran. Dari kasus itu juga jelas bahwa aparat penegak hukum kita belum satu suara. Kalu begitu sulit rasanya kasus-kasus besar akan dapat dituntaskan.

## SALAM SURYA

## Gerakan antipolitisi busuk

POLITISI busuk. Inilah kosa kata baru yang tiba-tiba menjadi isu sentral menjelang Pemilu 2004. Istilah yang sebenarnya diusung dari Korea Selatan ini mendadak menjadi populer. Masyarakat menyambut begitu antusias dan seolah sudah siap menghadapi para politisi busuk sebagai musuh bersama. Maka tak aneh, kalau gerakan antipolitisi busuk kemudian menjadi tumpuan masyarakat yang masih menyisakan sedikit harapan pada Pemilu 2004.

Siapaakah sebenarnya politisi busuk itu? Efektifkah gerakan antipolitisi busuk? Itulah sesungguhnya substansi ditunggu-tunggu masyarakat.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat kini bekerja keras menyusun dan merumuskan kriteria politisi busuk. Meski belum rampung, setidaknya ada empat hal pokok yang bisa dijadikan parameter kualifikasi politisi busuk. Pertama, kejahatan ekonomi seperti korupsi (dirumuskan ICW). Soal *drugs*, terlibat dalam obat bius (Granat - gerakan antinarkotika). *Domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga (dirumuskan LSM perempuan). Dan *human rights* (dirumuskan Kontras-Imparsial). Yang berkaitan dengan *human rights* (hak-hak asasi manusia = HAM) ini secara umum bisa dikatakan bahwa orang-orang yang dikualifikasikan sebagai politisi busuk, karena perbuatan atau tindakan mereka yang dianggap tidak menguntungkan, atau bahkan memusuhi hak asasi manusia. Antara lain, misalnya mereka yang terlibat secara langsung di dalam suatu pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam konteks domestik (rumah tangga).

Atau juga mereka yang pernyataan-pernyataannya di publik eksplisit atau implisit memusuhi hak asasi manusia dan demokrasi. Atau mereka-mereka yang menyatakan mendukung orang-orang yang sedang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Kriteria yang tengah disusun beberapa lembaga swadaya masyarakat ini tampaknya segera akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan publikasi itu diharapkan masyarakat tidak keliru memilih calon legislatif yang tergolong politisi busuk.

Nah, pertanyaannya kemudian apakah publikasi itu cukup efektif? Juga, apakah yang dipublikasikan itu hanya berupa kriteria. Lalu masyarakat mendefinisikan sendiri politisi mana yang bisa dimasukkan ke dalam kualifikasi politisi busuk. Ataukah publikasi itu berupa daftar nama lengkap foto - bila perlu - serta identitas dan *track record*-nya. Di sinilah sebenarnya substansi dan parameter gerakan antipolitisi busuk yang sesungguhnya. Apakah gerakan antipolitisi busuk kelak hanya akan berhenti sebagai gerakan moral, atau akan menjadi gerakan politik masyarakat yang sangat konsem menolak politisi busuk.

Kalau soal mengumumkan kriteria tentu tidaklah sulit. Tetapi mengumumkan nama-nama politisi busuk - meski kriterianya rinci - jelas bukan pekerjaan mudah. Terlalu banyak rambu-rambu yang mesti diperhatikan, misalnya asas praduga tak bersalah, dan etika. Sebut saja contoh Akbar Tandjung misalnya. Apakah putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam kualifikasi politisi busuk? Tentu masih banyak persoalan lain, yang bagi masyarakat tak mudah menggolongkan seseorang itu termasuk politisi busuk atau bukan. Sulit memang.

Pemilu 2004 ini memang taruhan. Apakah negeri ini kelak akan jadi ajang kipurah - bukan saja -para politisi busuk, tetapi juga birokrat busuk, bergantung kita. Di sinilah perlunya gerakan antipolitisi busuk terus dikembangkan. Dan untuk itu memang diperlukan komitmen bersama.

## SALAM SURYA

# Undian olahraga

UNDIAN Promosi Menonton Pertandingan Olahraga, nampaknya jadi dilaksanakan. Menurut Mensos Bachtiar Chamsyah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 673/HUK-UND/2003 izin yang diberikan Departemen Sosial adalah izin undian gratis bagi penonton pertandingan olahraga dan pelaksanaannya mulai 1 Februari mendatang.

Dalam surat itu disebutkan, peserta undian yang menonton pertandingan olahraga di tempat pertandingan yang ditentukan, dengan terlebih dulu membeli tiket. Kemudian, akan memperoleh nomor undian gratis berhadiah secara otomatis yang dicatat melalui sistem komputer *online*.

Undian itu berhadiah utama televisi 29 inci, lemari es, dan uang tunai Rp 600.000. Sedangkan hadiah kedua berupa uang tunai Rp 1.500.000 dan Rp 200.000.

Nilai hadiah sekali penarikan (penarikan sekali seminggu) Rp 2 miliar dan dilaksanakan sebanyak 52 kali penarikan sehingga total hadiah Rp 104 miliar. Dari jumlah ini, Departemen Sosial mendapat 10 persen yang merupakan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan dan diaudit oleh akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pro-kontra seputar masalah ini memang cukup ramai. Umumnya tidak setuju dengan undian karena berbau judi. Ketidaksetujuan itu benar, karena kita tahu bahwa hanya akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat kecil.

Kita semua tentu ingin prestasi olahraga kita muncul di kancah internasional. Olahraga kita memang dalam tahun-tahun ini sangat merosot prestasinya. Di negara-negara ASEAN saja kita sudah sulit bicara.

Salah satu kendala dalam hal peningkatan prestasi olahraga memang dana. Tanpa dana memang sulit mengharapkan olahraga kita maju. Sarana dan prasarana membutuhkan dana, belum lagi jika ingin optimal kita harus menghadirkan iptek sebagai penunjang. Semua itu butuh dana.

Tetapi kita juga tahu bahwa masalah pendanaan sebenarnya juga bisa diatasi dengan cara-cara kreatif. Salah satu cara yang mudah dengan meminta sumbangan. Namun cara ini sudah tidak banyak dimaui oleh penyumbang mengingat sumbangan entah melalui PMI, stiker dan model lain selalu saja diselewengkan penyelenggaranya.

Cara lain yang sebenarnya ampuh bisa dilakukan kalangan olahraga sendiri dengan meningkatkan prestasi olahraga itu sendiri. Jika prestasi bagus maka olahraga bisa menjadi *sportainment* yang akan mendatangkan sponsor dengan sendirinya.

Jika ini terjadi tak perlu lagi sumbangan atau kupon undian dan semacamnya yang dalam praktiknya belum tentu pengelolaannya transparan dan baik. Bahaya lain, kupon yang direncanakan kali ini bisa diboncengi togel.

## SALAM SURYA

# Kotak pemilu

KOTAK suara pemilu pesanan KPU nasibnya agak simpang siur. Kotak suara yang berjumlah 2,1 juta dan terbuat dari alumunium itu dikhawatirkan tidak dapat selesai pada waktunya.

Hal ini antara lain terjadi disebabkan fluktuasi harga material kotak sehingga biaya produksi tak dapat lagi ditutup oleh nilai kontrak yang ditandatangani.

Mencari alternatif lain, misalnya impor kotak *built up* dari negara eksportir juga sulit. Kabarnya stok hanya tersedia di China dan itu pun dalam jumlah yang jauh dari memadai dari apa yang kita perlukan. Mengganti material kotak suara misalnya dengan kayu lapis terbentur pada masalah prosedural yang dengan sendirinya memakan tempo. Paling tidak perlu tender baru.

Masalah lain muncul, karena perusahaan pemenang tender menjual perusahaannya ke tangan orang lain. Akibatnya kepastian pembuatannya juga menjadi terancam karena membuat kotak pemilu dalam jumlah besar tidak mudah.

KPU memakai material alumunium, dengan harapan agar dapat dipergunakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Karena selama ini, tiap kali pemilu pemerintah memesan kotak suara baru yang terbuat dari kayu, sedangkan nasib kotak suara lama tidak jelas lagi.

Ambil contoh negara-negara Asia Selatan yang menggunakan kotak suara dari besi yang dapat digunakan dari pemilu ke pemilu. Pemerintah bersangkutan hanya menambah kekurangannya saja, sesuai dengan pertambahan populasi pemilih. Dengan demikian anggaran negara dapat dihemat.

PERSOALANNYA, apakah kotak suara yang sangat vital perannya itu dapat selesai pada waktunya, mengingat apa yang telah dikemukakan di atas? Jika masalah kotak suara berlarut-larut maka dikhawatirkan ini akan mengganggu agenda pemilu dan menjadi pemicu konflik.

Tampaknya masalah teknis ini kurang dipikirkan masak-masak oleh KPU, termasuk masalah penanganan berkas-berkas caleg.

Seperti diberitakan media massa, banyak berkas caleg yang tercecer dan bahkan hilang. Pihak KPU mengatakan ini adalah *human error*. Yang pasti, hal ini menguatkan kesan dalam masyarakat persiapan Pemilu 2004 jauh dari rapi. Orang yang sudah patah selera dengan Pemilu 2004 benar-benar menjadi kehilangan nafsu.

KPU yang sekarang ini memang bukan dari kalangan politisi. KPU yang sekarang adalah dari kalangan perguruan tinggi. Barangkali karena bukan praktisi mereka agak lamban dalam kinerja dan terjebak main teori-teori melulu.

Suka atau tidak suka jika kotak pemilu ini gagal dibuat dan didistribusikan tepat pada waktunya, persiapan pemilu yang gegap gempita akan percuma. Jadwal pemilu kemungkinan harus diundur dan ini bisa menimbulkan kekacauan. Tetapi jangan sampai KPU terus mengambil kotak amal yang ada di pinggir jalan karena ini juga tak waras, atau malah menjadikan kotak pemilu kotak ajaib yang bisa menyulap suara.

## SALAM SURYA

# Ijazah palsu caleg

**B**ANYAK sudah caleg berguguran. Banyak alasan soal gugurnya caleg ini. Salah satu yang muncul di permukaan adalah sempitnya waktu melengkapi berkas dan tipisnya kemungkinan menjadi caleg.

Namun banyak juga para caleg yang sebenarnya gagal melengkapi syarat karena tidak memiliki ijazah. Sebagian lagi, di seluruh Indonesia para caleg coba-coba memalsukan ijazah.

Mereka itu jumlahnya mencapai ribuan. Panwaslu mengaku kewalahan bila meneliti satu per satu ijazah para caleg yang terindikasi palsu itu.

Mengapa banyak caleg yang memalsu ijazah, salah satunya karena cara ini tidak sulit.

Sekolah-sekolah yang menjadi benteng integritas banyak yang rela menjual ijazah. Mereka menemukan pasar gelap yang empuk di tangan pencari kerja maupun pengejar status.

Nah, jika caleg-caleg ini berhasil lolos menjadi wakil rakyat, bisa diduga bagaimana mutu dan moralitasnya. Padahal, lembaga legislatif dari waktu ke waktu harus menjadi badan politik yang bersih.

Para caleg yang memalsukan ijazah jelas memiliki sikap tidak tulus. Mereka seharusnya dikategorikan juga sebagai politikus busuk oleh gerakan antipolitikus hitam yang kini merebak di mana-mana.

Karenanya KPU harus mencoret para caleg yang diketahui berijazah palsu itu. Karena, apa pun alasannya, tidak bisa dibenarkan seorang wakil rakyat memanipulasi ijazah, sertifikat yang menandakan seseorang memiliki kecerdasan dan kompetensi tertentu. Kalau kompetensi diri bisa dipalsukan, apalagi yang tidak bisa?

Kepada para pemilih ijazah palsu itu, sanksinya tidak cukup hanya digugurkan pencalonannya. Mereka juga harus dihukum karena pemalsuan itu. Termasuk yang harus dihukum berat adalah pejabat atau lembaga yang mau mengeluarkan ijazah palsu. Masalahnya, para caleg itu berasal dari parta-partai

Partai-partai politik rupanya belum bisa diandalkan sebagai penegak citra. Papol bukan gerbang penjaga integritas dan moralitas bangsa. Ribuan ijazah palsu yang ditemukan dari para caleg menunjukkan bahwa parpol justru menjadi atau dijadikan rimba kepalsuan dan pemalsuan.

Kalau ini diteruskan maka kerusakan mentalitas bangsa ini telah demikian parahnya, sehingga kita mungkin tidak tahu lagi harus memulai dari titik mana untuk memperbaikinya.

Gerakan antipolitikus busuk yang kini merebak adalah salah satu cara menumbuhkan budaya malu. Kalau mereka tetap saja tidak tahu malu, gerakan ini tidak boleh berhenti, dan harus terus diupayakan agar masyarakat semakin sadar bahwa tidak boleh ada lagi wakil rakyat yang moralitasnya diragukan dan tak berkualitas.

## SALAM SURYA

# Warga Tionghoa jangan dijadikan sapi perahan

**A**DA pernyataan menarik dari Perhimpunan Indonesia Warga Tionghoa (INTI) agar partai politik (parpol) tidak menjadikan mereka sebagai sapi perahan. Dalam arti mereka hanya hendak dipeloroti uangnya.

Mereka sudah belajar dari pengalaman setiap pemilihan umum (pemilu). Mereka memang didekati, dirangkul, tetapi ternyata itu hanya untuk diserap uangnya.

Pernyataan itu membuka perspektif kita bahwa ada kesadaran baru dari kalangan warga Tionghoa, untuk memberikan kontribusi politik kepada bangsa ini secara lebih bermakna.

Makna yang bagaimana? Yaitu partisipasi politik tidak hanya dalam bentuk uang. Melainkan keterlibatan bersama komponen masyarakat lain dalam mengelola arah perkembangan bangsa ini.

**MASALAHNYA**, apakah selama ini mereka benar-benar cuma jadi sapi perahan? Kita melihat tidak seluruhnya benar.

Untuk mayoritas warga Tionghoa, khususnya yang perekonomiannya menengah ke bawah, barangkali ada benarnya. Tetapi untuk warga Tionghoa kelas ekonomi tinggi seperti para konglomerat, rasanya tidak tepat.

Kontribusi uang warga Tionghoa ekonomi tinggi, mendapatkan imbal balik politik seperti kebijakan yang menguntungkan mereka. Mendapatkan proteksi politik untuk menggelembungkan bisnisnya.

Kita bisa melihat banyak konglomerat warga Tionghoa yang dibesarkan oleh imbal balik politik. Terutama di zaman Orde Baru. Sehingga mereka bukanlah menjadi bisnis yang kuat karena tumbuh dari bawah, melainkan bisnis yang semu. Konglomerasi yang rapuh.

Terbukti, mereka rawan jatuh. Bahkan kalau kita mau jujur, dari merekalah berbiak penyakit ekonomi nasional seperti kredit macet, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Karena mereka tumbuh dan besar dari proteksi politik, maka tatkala proteksi dianggap tidak lagi kuat maka mereka membawa asetnya ke luar negeri.

Naga-naganya setelah Orde Baru jatuh, mereka kembali memainkan pola yang sama untuk mendapatkan proteksi dari rezim yang berkuasa maupun dari partai politik.

**TERLEPAS** adanya kesilapan dari INTI dalam mempersepsi posisi warga Tionghoa, kita tetap menghargai pendapat INTI agar warga Tionghoa tidak dijadikan sapi perahan.

Memang begitu seharusnya. Tidak enak dijadikan sapi perahan terus-menerus melalui tekanan politik. Bahkan diskriminasi politik.

Untuk itu, sekarang kembali kepada warga Tionghoa sendiri apakah masih akan menggunakan pola lama yaitu justru mencari proteksi politik, entah kepada rezim yang berkuasa maupun partai politik.

Terus terang, gejala ini masih sangat kuat. Banyak pengusaha Tionghoa yang membagi-bagikan dana kepada pelbagai partai politik. Harapannya, mendapat proteksi. Mendapat kemudahan.

Tentu saja sasaran utama adalah kalau partai itu berkuasa, bisa membentuk aliansi strategis yang disebut "pangusaha" yaitu antara penguasa dengan pengusaha.

**SALAM SURYA****Pelajaran dari Petro Widada**

**PABRIK** Petro Widada meledak dan terbakar, akibatnya dua orang dinyatakan tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka. Korban material juga cukup banyak karena puluhan kendaraan bermotor juga hangus terbakar.

Asal terjadinya ledakan dan kebakaran belum jelas dikarenakan kejadian berlangsung cepat dan tertutup asap tebal. Pabrik yang memproduksi bahan kimia *phthalic anhydride*—bahan dasar pembuat plastik memang cukup mengagetkan kita semua karena jarang terjadi sebuah pabrik mengalami kecelakaan seperti itu.

Kebakaran setelah ledakan terjadi berlangsung cepat karena bahan kimia ini tergolong bahan *intermediate* yang bisa digunakan untuk pembuatan bermacam-macam senyawa kimia.

Cairan ini, lanjutnya, memiliki tingkat kebahayaan cukup tinggi. Ini dikarenakan cairannya cukup pekat, sehingga apabila terbakar akan menimbulkan ledakan yang cukup hebat dan sulit dipadamkan oleh air. Dan penyebab kebakaran tersebut diantaranya, bahan kimia disimpan dalam tekanan dan suhu tinggi.

Kita semua tentu tidak menginginkan kecelakaan semacam ini terjadi lagi. Karena itulah harus dilakukan penyelidikan atau investigasi menyeluruh soal kebakaran Petro Widada.

Hal pertama yang rasanya harus diteliti adalah masalah prosedur. Perusahaan kimia pada umumnya memiliki prosedur tertentu yang sangat ketat.

Dan kalau itu dipatuhi, maka kecelakaan akan bisa diminimalisir. maka jika terjadi kecelakaan berarti ada prosedur yang dilanggar atau diabaikan.

Adanya prosedur yang dilanggar itu biasanya bersumber dari kelalaian karena sistem yang bekerja di sebuah perusahaan sudah menjadi rutinitas. Akibatnya para pengelola tidak memberikan perhatian yang tinggi terhadap bahaya yang akan timbul.

Peristiwa yang menimpa Petro Widada bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya tahun 2002 lalu pernah terjadi hal serupa tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang besar.

Hal lain yang harus kita cermati adalah dampak bagi lingkungan. Mestinya kita harus mengkaji ulang dengan peristiwa yang menimpa Petro Widada.

Lingkungan pabrik kimia yang berdekatan dengan permukiman, jelas bukan hal yang ideal. Kedekatan dengan permukiman jelas menimbulkan kerawanan. Banyak kasus kecelakaan yang menimpa industri kimia dampaknya tidak dirasakan saat terjadinya kecelakaan tetapi baru terlihat pada beberapa tahun kemudian.

Karena itulah, jika pabrik ini kemudian akan didirikan kembali aspek-aspek ini harus mendapatkan perhatian serius dan bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi semata.

Tak kalah penting adalah pemerintah daerah harus juga menyiapkan diri menghadapi kecelakaan yang menimpa industri di wilayah Gresik. Korban bisa ditekan jika pemerintah daerah menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan akibat kecelakaan seperti di Petro Widada.

**SALAM SURYA****Perlu tindakan serius atasi flu burung**

**ORGANISASI** Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan wabah flu burung penyebarannya bisa lebih luas dari pada yang diperkirakan para ahli saat ini, bahkan kemungkinan sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara.

WHO, juga menyatakan penyebaran turunan virus flu, H5N1 (penyebab flu burung), di sejumlah negara yang terjadi secara simultan itu tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan kondisi saat ini bisa menjadi makin parah.

Thailand merupakan negara Asia terakhir yang mengakui penularan flu burung di wilayahnya. Di Vietnam, virus flu burung ini sudah menewaskan lima orang. Sebelum Vietnam, kasus flu burung dilaporkan muncul di Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan jenis virus yang lebih tidak berbahaya, H5N2, telah ditemukan di sebuah pertanian di Taiwan.

WHO menekankan pemberantasan virus H5N1 pada populasi unggas sangat penting untuk mencegah munculnya subtype virus flu baru yang berpotensi pandemik.

Menurut WHO, kondisi ini juga meningkatnya risiko pertukaran gen virus dari manusia ke burung atau sebaliknya. Ini bisa terjadi kalau manusia secara simultan terinfeksi virus flu manusia dan unggas.

Manusia yang tertular virus ini bisa tewas. Kematian disebabkan oleh dua hal. Pertama karena radang paru hebat yang menginfeksi saluran pernapasan. Kedua karena kadar oksigen di dalam menurun dan karbon dioksida dalam darah meningkat.

Bagaimana sikap RI? Menteri Pertanian Bungaran Saragih yakin meski saat ini berjangkit virus flu burung di sejumlah negara, masyarakat tidak perlu khawatir.

Dia menegaskan mengonsumsi daging dalam negeri baik dari unggas tetap aman, apalagi pemerintah telah melarang masuknya produk ternak dari negara yang terkena penyakit flu burung.

Bungaran menyatakan, sejak berjangkitnya virus flu burung di beberapa negara Asia saat ini pemerintah menetapkan larangan impor ternak maupun produk ternak unggas dari Korea, Jepang, Vietnam dan Thailand yang dinyatakan terkena virus yang menyerang ternak unggas tersebut oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Apa yang dikatakan mentan nampaknya tergesa-gesa. Barangkali mentan hanya ingin menyelamatkan peternak dari kebangkrutan massal karena flu burung ini.

Kenyataan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa flu burung itu ada di Indonesia. Dan jumlah korban unggas sudah banyak berjatuhan. Kita tidak ingin krisis ini meluas. Karenanya diperlukan kerja cepat dan sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Bukankah lebih baik kita bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dibanding melontarkan pernyataan tanpa dasar.

**SALAM SURYA**

**Pembangunan Nipah jangan lagi berdarah**

**PEMBANGUNAN** Waduk Nipah di wilayah Kabupaten Sampang (Madura) menurut rencana akan dihidupkan kembali. Proyek ini macet setelah terjadi penembakan oleh aparat terhadap rakyat yang hendak memprotes pembangunan waduk itu.

Peristiwa pada 25 September 1993 itu menewaskan tiga orang warga dan beberapa cedera.

Sejak itu, pemerintah mau mengalah. Tidak dengan serta merta hendak memaksakan proyeknya ke masyarakat. Pemerintah tahu, bahwa rakyat tidak bisa diperlakukan secara keras apalagi kasar karena masyarakat akan mereaksi dengan sikap yang lebih keras.

Untuk itulah pemerintah memilih melakukan pendekatan secara persuasif. Bupati Fadhilah Budiono memiliki kemampuan itu. Ia rajin silaturahmi ke kiai dan tokoh masyarakat menjual rencana tersebut.

Fadhilah tahu persis adat istiadat Madura. Kiai dan tokoh masyarakat adalah seperti kepala pada seekor belut. Kalau kepalanya sudah dipegang, maka ekornya akan mengikut.

**KITA** melihat perubahan pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan suatu yang positif. Hal demikian sejalan dengan konsep pembangunan dari bawah ke atas atau *bottom up*.

Hal demikian senapas dengan pola pembangunan yang berwatak partisipatif. Artinya, masyarakat terlibat secara penuh dan strategis sejak penyusunan konsep, pematangan rencana, sosialisasi rencana sampai pelaksanaan pembangunan dan evaluasi.

Pola demikian harus dilakukan secara jujur. Sebab ada yang begitu keras menyuarakan pola pembangunan partisipatif tetapi dalam praktiknya bersifat semu.

Rakyat dijemak dalam keseolah. Rakyat seolah sudah diajak bicara, padahal cuma dijejali konsep. Rakyat seolah sudah dilibatkan dalam perencanaan, padahal cuma dipakai legitimasi. Rakyat seolah sudah dilibatkan dalam pelaksanaan, padahal cuma jadi makelar material atau pembebasan tanah.

**MELIHAT** posisi Madura sekarang, pembangunan waduk merupakan kebutuhan mendasar. Seringkali Madura, khususnya daerah Sampang, kesulitan air bersih pada musim kemarau. Sementara terjadi banjir di musim hujan.

Tidak adanya dukungan air membuat pembangunan irigasi teknis sulit. Hampir tidak ada lahan beririgasi teknis di Sampang. Pertanian dikembangkan di atas lahan sawah tadah hujan atau tegalan.

Kendati pembangunan waduk merupakan kebutuhan, kita perlu mengingatkan agar pelaksanaannya tetap berpijak pada nilai kesabaran. Pemerintah harus sabar *ngemong* rakyat.

Di samping itu, kita ingatkan agar dalam proses pembangunan ini tidak menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Misalnya dalam pembebasan tanah. Rakyat jangan ditipu dengan penggunaan makelar tanah, yang bisa saja dijabat oleh tokoh masyarakat.

Kita berharap pemerintah *istiqamah* dengan rencana dan paradigma pembangunan yang bersifat partisipatif. Janganlah mengulangi kesalahan kedua. Hanya keledai yang terantuk batu dua kali di tempat yang sama.

**SALAM SURYA**

**Ambil langkah cepat atasi flu burung**

**LONCENG** kematian bertalu-talu bagi peternak unggas di Jawa Timur. Flu burung benar-benar mewabah. Kerugian ditaksir mencapai Rp 87,5 miliar.

Perkembangan wabah ini sangat cepat. Bahkan pada saat flu ini sudah berjangkit, Menteri Pertanian Bungaran Saragih masih menyanggah.

Jadi, lebih cepat perkembangan wabah daripada informasi penyebaran penyakit ini. Bisa juga menunjukkan betapa lambannya pemerintah dalam menyikapi masalah rakyatnya.

Sebenarnya, kalau hal itu memang menunjukkan kelambanan pemerintah adalah hal yang biasa. Dalam banyak hal pemerintah memang lamban. Misalnya soal tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diusir dari Malaysia. Soal kerusakan di Poso. Kelangkaan minyak tanah.

Sekaligus menunjukkan kerja pemerintah yang tidak efektif. Ini tentu bukan akibat reformasi yang membikin pemerintah limbung, tetapi memang kinerja pemerintah yang secara keseluruhan kurang menunjukkan perbaikan.

**WABAH** flu burung ini jelas memiliki dampak yang sangat panjang dengan arah yang bercabang-cabang. Bagi peternak merupakan kerugian yang sangat besar. Apalagi banyak peternak kecil yang bisa saja gulung tikar.

Hancurnya peternak akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Sektor perunggasan memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup besar mulai dari tukang kandang sampai tukang angkut ayam.

Dampak lain, akan banyak industri pakan unggas yang gulung tikar. Industri ini tidak hanya dalam skala besar tetapi juga banyak industri kecil. Lagi-lagi implikasinya akan menambah jumlah pengangguran yang di Indonesia sudah mencapai sekitar 45.000 orang.

*Flu burung ini akan segera diikuti stop impor unggas dari Indonesia oleh negara lain dari Indonesia.* Jepang sudah melakukan. Ini menimbulkan citra negatif yang belum tentu bisa dipulihkan dalam waktu pendek. Dan masih banyak dampak lagi dalam sosial ekonomi.

**MELIHAT** dampak yang sangat panjang ini kita sangat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban. Elite negara terlalu sibuk mengurus pemilihan umum. Sibuk bagaimana mempertahankan kedudukan.

Untuk itu, kita berharap pemerintah mengubah sikapnya dengan lebih cekatan menangani flu burung ini.

Misalnya, pemerintah melakukan pemeriksaan intensif ke peternak kecil maupun besar. Kemudian membeli unggas-unggas yang terinfeksi sebelum dijual ke masyarakat. Kemudian unggas yang terinfeksi itu dibakar.

Tentu semua itu atas biaya negara. Sulit diharapkan peternak membakar sendiri. Peternak akan berusaha memperkecil kerugian dengan tetap menjual unggas yang terinfeksi betapapun dengan harga murah.

Pemerintah harus segera mengeluarkan dana dan langkah darurat untuk menyelamatkan perunggasan. Hentikan perdebatan dan pertikaian politik. Atasi masalah riil yang sedang aktual ini.

## SALAM SURYA

# Mari kita dukung Cak Nur Cs

UNJUK rasa, membuat pernyataan sikap, menggelar renungan bersama dan berbagai aktivitas politik lainnya telah terlihat semakin marak menjelang pemilu ini.

Ada mahasiswa, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai kalangan lainnya berdemo, menyatakan sikap atau membuat komisi untuk memerangi hal-hal yang dinilai merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seruan antipolitisi busuk, antibangkitnya rezim Orde Baru, anti-KKN dan anti-*money politics* pun menggema di berbagai pelosok tanah air, termasuk di Graha Fakultas Kedokteran Unair, Surabaya, Selasa (27/1).

Lima tokoh politik dan tokoh agama di luar pemerintahan telah mendeklarasikan Poros Penyelamat Bangsa (PPB). Mereka adalah cendekiawan muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur), Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Hidayat Nurwahid, Sekjen Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Dr Andi Mallarangeng dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Prof Mahfud MD.

Selain menyuarakan pemberantasan KKN, *money politics* dan pelanggaran HAM, mereka juga berkomitmen menjaga integritas bangsa, menegakkan hukum, membela *wong cilik* dan antiintervensi asing.

Terlepas dari siapa dan bagaimana sepak terjang mereka dalam hidup keseharian, niat mereka —sebagaimana kerap mereka ungkapkan dalam berbagai kesempatan— sangat mulia. Mereka telah menyadari bahwa kondisi mentalitas bangsa ini benar-benar memprihatinkan.

Sebagian politisi sudah tak lagi mengenal budaya malu. Dalam proses pencalegan saja telah terlihat betapa menyeorokkan mentalitas kita. Ada caleg berijazah palsu, memaksakan kehendak, menjegal caleg lain, membeli atau menjual nomor urut dan lain-lain.

Pesta demokrasi nampaknya bakal menjadi pesta duka karena rakyat tak tahu harus memilih apa dan siapa. Tak ada sosok yang benar-benar nyata, lahir-batin. Yang akan mereka pilih adalah badut-badut yang tak lagi lucu.

Kalau para badut terpilih, maka bangsa dan negara akan menjadi 'srimulat'. Segala sesuatu yang seharusnya dilakukan secara serius, ternyata mengundang tawa. Atau, yang harus ditertawakan, malah ditangisi, seperti terungkap dalam syair lagu *Started A Joke*.

Cak Nur Cs telah menyadari semua itu. Karena itu, mereka mencoba menggugah kesadaran kita semua. Bahwa kita semua telah berada di jalan yang salah. Mereka mengajak kita berenung, berkomitmen dalam hati masing-masing supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

Namun demikian, mengajak bangsa bermenung tidaklah mudah. Rakyat sepertinya telah jenuh dengan berbagai 'drama' bangsa ini. Mereka pernah memuja-muja sejumlah tokoh bangsa, karena suara mereka begitu indah dan penuh kebenaran. Namun, ketika para tokoh pujaan telah berada 'di atas angin', ternyata tiba-tiba wujud mereka berubah menjadi sosok-sosok yang menyedihkan.

Itulah yang telah terjadi. Fakta-fakta empiris ini kerap membuat kita semua tidak mudah percaya janji-janji dan komitmen. Kenyataan-kenyataan pahit itu telah meyakinkan kita semua, bahwa bangsa dan negara ini tak lagi butuh buaian, melainkan perlu keteladanan.

## SALAM SURYA

# Jangan remehkan flu burung

AKHIRNYA Presiden Megawati memerintahkan pemusnahan unggas yang terinfeksi *avian influenza* (AI) yang lebih dikenal dengan flu burung.

Sebelumnya, Senin (26/1), Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih menyatakan untuk saat ini belum ada rencana pemusnahan besar-besaran meski jutaan ternak di seluruh Indonesia telah terinfeksi wabah tersebut.

Sebaliknya, menurut para pejabat Departemen Pertanian Indonesia, pemerintah akan mengantirina dan mensterilkan peternakan-peternakan dan memulai program vaksinasi besar-besaran.

Keputusan presiden itu berarti selaras dengan desakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang kemarin, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memusnahkan hewan ternak yang terinfeksi *avian influenza* (AI) atau lebih dikenal dengan flu burung itu.

Badan itu mengatakan vaksinasi atau tindakan lainnya untuk memerangi penyakit itu tidak akan berhasil. Menurut WHO tidak diragukan lagi pemusnahan harus dilakukan untuk mengendalikan wabah itu.

WHO mengatakan pemusnahan 1,5 juta ayam dalam tiga hari di Hongkong pada 1997 berhasil mencegah epidemik itu.

Sepuluh negara Asia telah memastikan dilanda flu burung, setelah Selasa China mengonfirmasi adanya wabah itu di peternakan ayamnya. Sekitar 20 juta ayam telah dimusnahkan atau mati akibat penyakit itu. Kebanyakan negara-negara yang terjangkit virus itu telah melakukan pemusnahan besar-besaran, kecuali Indonesia.

Langkah yang diserukan presiden itu baik. Namun pemerintah nampaknya harus memperhatikan yaitu pernyataan bahwa flu burung itu tidak menyerang manusia seperti dinyatakan beberapa pejabat baik di pusat maupun daerah.

Pernyataan itu jelas sekali menganggap remeh kenyataan yang ada di berbagai negara di Asia yang sudah menderita korban jiwa akibat serangan flu burung.

Padahal WHO sendiri sudah mengingatkan bahaya penularan dari unggas ke manusia itu. Bahkan WHO mulai mengkhawatirkan dampak lebih jauh dari virus flu burung itu jika bercampur dengan virus flu manusia. Menurut WHO jika terjadi percampuran, maka bisa-bisa terbentuk apa yang dinamakan dengan virus flu super yang nantinya menjalar dari manusia ke manusia dengan cepat.

Oleh karena itu kita berharap pemerintah melakukan langkah-langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari serangan flu burung itu.

Tindakan pencegahan bagi para peternak maupun pekerja di sektor perunggasan bukan satu-satunya langkah yang efektif. Kita mengharapkan adanya *surveillance* yang menyeluruh sehingga mampu mendeteksi bahaya lebih dini. Tanpa penelitian yang memadai kita bisa kecolongan virus flu itu melalui kedatangan wisatawan manca maupun produk impor unggas dari luar negeri. Sekali lagi kita berharap pemerintah tidak meremehkan flu burung. Jika itu terjadi bisa-bisa korban manusia berjatuhan di tanah air.